

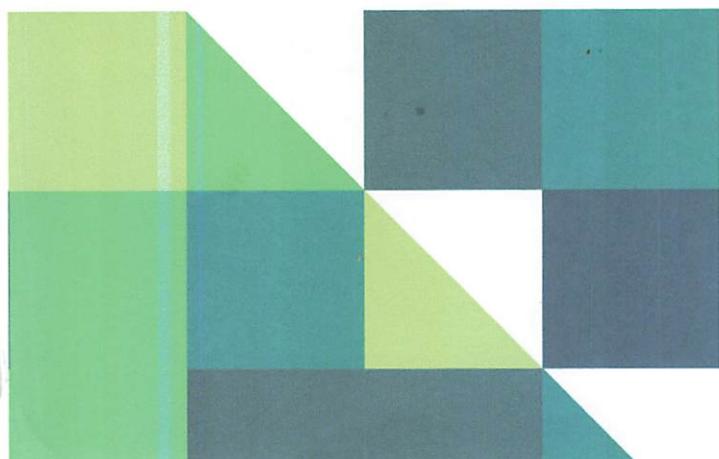


**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2021

(Audited) 



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Litbang Perhubungan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Litbang Perhubungan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 April 2022

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan



Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

| No. | Nama | Tanggal | Paraf |
|-----|---|---------------|-------|
| 1 | Sekretaris Badan Litbang Perhubungan | 28 April 2022 | |
| 2 | Kepala Puslitbang Transportasi Antarmoda | 28 April 2022 | |
| 3 | Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkotaan | 28 April 2022 | |
| 4 | Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan | 28 April 2022 | |
| 5 | Kepala Puslitbang Transportasi Udara | 28 April 2022 | |

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Litbang Perhubungan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Litbang Perhubungan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Januari 2022

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN



Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iv |
| Ringkasan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. Neraca | 4 |
| III. Laporan Operasional | 5 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 17 |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca | 33 |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional | 49 |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 58 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 64 |
| VI. Lampiran dan Daftar | 68 |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Tahun 2021 tingkat Eselon I Badan Litbang Kementerian Perhubungan selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Litbang Perhubungan.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 April 2022

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan

Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id

Web-site : http://www.balitbanghub.dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Tahun 2021 tingkat Eselon I Badan Litbang Kementerian Perhubungan selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Litbang Perhubungan.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 April 2022

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan

Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

| No. | Nama | Tanggal | Paraf |
|-----|---|---------------|-------|
| 1 | Sekretaris Badan Litbang Perhubungan | 28 April 2022 | |
| 2 | Kepala Puslitbang Transportasi Antarmoda | 28 April 2022 | |
| 3 | Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkotaan | 28 April 2022 | |
| 4 | Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan | 28 April 2022 | |
| 5 | Kepala Puslitbang Transportasi Udara | 28 April 2022 | |

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.341.922.174,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 139.578.138.938,- atau mencapai 98,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 140.998.851.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Nilai Aset yang dicatat dan disajikan sebesar Rp. 77.667.052.689,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 21.219.400,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 76.667.722.709,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 978.110.580,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 61.914.000,- dan Rp. 77.605.138.689,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar sampai dengan periode per 31 Desember 2021. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 536.479.368,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 140.523.475.593,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (139.986.996.225)-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp. 731.176.306,- dan Rp. (139.255.819.919),- . Pos Luar Biasa sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (139.255.819.919),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 71.253.603.288,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (139.255.819.919),- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (60.876.271),- dan transaksi antar entitas senilai Rp. 145.668.231.591,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 77.605.138.689,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

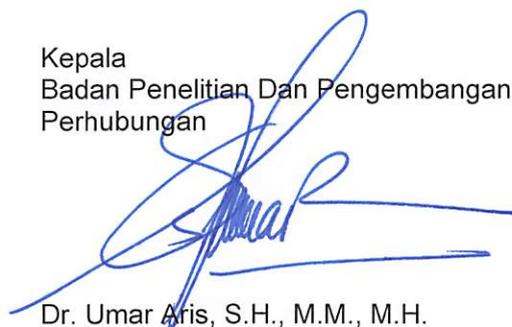
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | TA 2021 | | % thd Angg | TA 2020 |
|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | - | 1.341.922.174 | 0,00 | 1.729.738.044 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | 1.341.922.174 | 0,00 | 1.729.738.044 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Operasi | B.2. | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 32.063.269.000 | 31.226.146.586 | 97,39 | 26.931.951.693 |
| Belanja Barang | B.4 | 102.254.138.000 | 101.673.266.161 | 99,43 | 110.330.817.072 |
| Belanja Modal | B.5 | 6.681.444.000 | 6.678.726.191 | 99,96 | 18.182.206.301 |
| Belanja Bantuan Sosial | B.6 | - | - | 0,00 | - |
| JUMLAH BELANJA | | 140.998.851.000 | 139.578.138.938 | 98,99 | 155.444.975.066 |

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan



Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2021 | 2020 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | - | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.2 | - | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.3 | - | - |
| Piutang PNB | C.4 | - | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | C.5 | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran | C.6 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek | C.7 | - | - |
| Beban Dibayar di Muka | C.8 | - | - |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima | C.9 | - | - |
| Persediaan | C.10 | 21.219.400 | 42.215.145 |
| Persediaan Belum Diregister | | - | - |
| Jumlah Aset Lancar | | 21.219.400 | 42.215.145 |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | C.11 | - | - |
| Tagihan Penjualan Angsuran | C.12 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar | C.13 | - | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | - | - |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.14 | - | - |
| Tanah Belum Diregister | | - | - |
| Peralatan dan Mesin | C.15 | 65.826.805.591 | 64.756.736.953 |
| Peralatan dan Mesin Belum Diregister | | - | - |
| Gedung dan Bangunan | C.16 | 46.605.855.025 | 38.929.819.413 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.17 | 13.687.694.174 | 13.687.694.174 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister | | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | C.18 | 3.522.153.447 | 3.522.153.447 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.19 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.20 | (52.974.785.528) | (50.903.173.433) |
| Jumlah Aset Tetap | | 76.667.722.709 | 69.993.230.554 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.21 | 2.263.384.000 | 2.067.815.000 |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | | - | - |
| Aset Lain-Lain | C.22 | 4.489.769.330 | 5.351.689.405 |
| Aset Lainnya Belum Diregister | | - | - |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.23 | (5.775.042.750) | (6.154.807.816) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 978.110.580 | 1.264.696.589 |
| JUMLAH ASET | | 77.667.052.689 | 71.300.142.288 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.24 | - | - |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.25 | 61.914.000 | 46.539.000 |
| Pendapatan Diterima di Muka | C.26 | - | - |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | C.27 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 61.914.000 | 46.539.000 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 61.914.000 | 46.539.000 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.28 | 77.605.138.689 | 71.253.603.288 |
| JUMLAH EKUITAS | | 77.605.138.689 | 71.253.603.288 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 77.667.052.689 | 71.300.142.288 |

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan

Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2021 DAN 30 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2021 | 2020 |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 536.479.368 | 327.316 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 536.479.368 | 327.316 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 31.241.521.586 | 26.978.490.693 |
| Beban Persediaan | D.3 | 2.842.140.560 | 3.831.175.179 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 66.435.416.629 | 72.047.138.538 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 3.613.945.613 | 2.437.522.093 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 28.802.759.104 | 31.920.575.440 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D.7 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | D.8 | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.9 | 7.587.692.101 | 6.895.996.675 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.10 | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 140.523.475.593 | 144.110.898.618 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (139.986.996.225) | (144.110.571.302) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar | D.11 | 543.711.493 | (38.580.565.928) |
| Pendapatan pelepasan aset Non Lancar | | 617.977.993 | 434.374.597 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | | 74.266.500 | 39.014.940.525 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 187.464.813 | 1.308.875.584 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 187.464.813 | 1.353.918.468 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | 45.042.884 |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 731.176.306 | (37.271.690.344) |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (139.255.819.919) | (181.382.261.646) |
| POS LUAR BIASA | | | |
| Pendapatan PNB | D.12 | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | - | - |
| Beban Persediaan | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | (139.255.819.919) | (181.382.261.646) |

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan



Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2021 DAN 30 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2021 | 2020 |
|---|---------|-----------------------|--------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 71.253.603.288 | 513.283.827.735 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (139.255.819.919) | (181.382.261.646) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | (60.876.271) | (414.363.199.823) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3.1 | - | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.2 | - | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.3 | - | - |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | E.3.4 | - | 552.532.500 |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.3.5 | - | - |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REV | E.3.6 | (60.876.271) | (414.915.732.323) |
| JUMLAH | | (60.876.271) | (414.363.199.823) |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 145.668.231.591 | 153.715.237.022 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | 6.351.535.401 | (442.030.224.447) |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 77.605.138.689 | 71.253.603.288 |

Kepala
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan

Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19630220 198903 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Litbang Perhubungan

Badan Litbang Perhubungan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya transportasi yang handal melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, Jakarta.

Badan Litbang Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi, dan melakukan kerjasama dengan lembaga iptek. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas penelitian, pengembangan dan teknologi menjadi landasan perumusan kebijakan strategis transportasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Litbang Perhubungan berkomitmen dengan visi ***“Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyusun Kebijakan Teknis, Rencana dan Program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- Melakukan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi.
- Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- Melaksanakan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Litbang Perhubungan yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Litbang Perhubungan adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAKPA

| No | Kode Satker | Entitas | Jumlah/Jenis Kewenangan | | | | Jumlah Satker |
|---------------|-------------|--|-------------------------|----|----|----|---------------|
| | | | KP | KD | DK | TP | |
| 1 | 288752 | Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 1 | | | | 1 |
| 2 | 414267 | Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 1 | | | | 1 |
| 3 | 288944 | Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan | 1 | | | | 1 |
| 4 | 288951 | Puslitbang Transportasi Udara | 1 | | | | 1 |
| 5 | 634171 | Puslitbang Transportasi Antarmoda | 1 | | | | 1 |
| Jumlah | | | 5 | | | | 5 |

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Litbang Perhubungan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan

yang merupakan entitas pelaporan dari Deputy Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Litbang Perhubungan telah mengadakan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian | 2021 | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | PAGU AWAL | PAGU REVISI | TAMBAH/ KURANG |
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN | 0 | 0 | 0 |
| Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan | - | - | - |
| Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 30.816.569.000 | 32.063.269.000 | 1.246.700.000 |
| Belanja Barang | 155.447.503.000 | 102.254.138.000 | (53.193.365.000) |
| Belanja Modal | 11.729.099.000 | 6.681.444.000 | (5.047.655.000) |
| Jumlah Belanja | 197.993.171.000 | 140.998.851.000 | (56.994.320.000) |

Perubahan Pagu Anggaran disebabkan adanya penanganan Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

| Akun | Jenis Belanja | Anggaran | |
|---------------|---|-------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi |
| 521131 | Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 | 505.510.000 | 3.518.577.000 |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 | 201.600.000 | 1.462.055.000 |
| 522192 | Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 | 819.600.000 | 1.075.960.000 |
| 532119 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 | - | 50.000.000 |
| Jumlah | | - | 6.106.592.000 |

Selama periode tahun anggaran berjalan telah dilakukan 3 (tiga) kali revisi terhadap DIPA Badan Litbang Perhubungan dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi pertama dilaksanakan pada bulan Februari berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.001/1/10 Phb 2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal penyampaian Rekapitulasi dan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian Perhubungan dan Surat Menteri keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dalam rangka *Refocussing* Belanja K/L untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional,

penanganan Pandemi COVID-19 dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional;

2. Revisi kedua pada bulan Juni berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.002/9/8 Phb 2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Revisi Anggaran Antar Unit Kerja Eselon I dalam Satu Program (Dukungan Manajemen) untuk Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2021 dan Surat Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KU.002/1/6/BLT/2021 Perihal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Badan Litbang Perhubungan;
3. Revisi ketiga pada bulan Juli didasarkan pada Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.001/6/16-PHB-2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Rekapitulasi *Refocussing* dan Realokasi Belanja TA 2021 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka adanya *refocussing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 untuk mendanai penanganan Pandemi COVID-19 dan Revisi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Badan Litbang Perhubungan. *Refocussing* Tahap III Sesuai DJA nomor: S-550/AG/AG.3/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Realisasi
Pendapatan
Rp.1.341.922.174

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.341.922.174,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan lingkup Badan Litbang Perhubungan terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2021 | | |
|---|----------|----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | - | 617.977.993 | - |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | - | 536.479.368 | - |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL | - | 3.928.724 | - |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL | - | 183.536.089 | - |
| Jumlah | - | 1.341.922.174 | - |

| Pendapatan Negara Bukan Pajak | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Kode Aku | Uraian | NTPN | anggal Baya | Pihak Ketiga | Jumlah |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | | | | | |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 327E72G4UTPUE324 | 17/06/2021 | PT. Indosat | 167.781.000 |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 5007055DEDN45HD0 | 19/08/2021 | PT. Solusi Tunas Pratama | 158.090.000 |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 6B8E848VUJDE97L8 | 11/11/2021 | PT. TELKOM | 210.000.000 |
| Puslitbang Transportasi LSDP | | | | | |
| 425131 | Kesalahan Pemotongan Uang Sewa Rumah Dinas Pimpinan | Potongan Gaji | | | 608.368 |
| Jumlah | | | | | 536.479.368 |

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari penjualan aset dengan proses lelang berupa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit bus, 1 (satu) unit mini bus, 7 (tujuh) unit motor, dan 3 (tiga) unit mobil. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari sewa Menara BTS, penerimaan belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari kelebihan pembayaran belanja pegawai tahun sebelumnya, dan penerimaan belanja barang Tahun Anggaran yang lalu berasal dari setoran kelebihan pembayaran belanja barang dan kegiatan kontraktual. Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja di Badan Litbang pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

| URAIAN | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 900.609.417 | 324.792.390 | 177,29 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | 132.608.368 | 581.465.564 | (77,19) |
| Puslitbang Transportasi Udara | 95.168.168 | 423.980.090 | (77,55) |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 182.896.604 | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | 30.639.617 | 399.500.000 | (92,33) |
| Jumlah | 1.341.922.174 | 1.729.738.044 | (22,42) |

Realisasi Belanja
Rp.139.578.138.938

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 139.578.138.938,- atau 98,99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 140.998.851.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

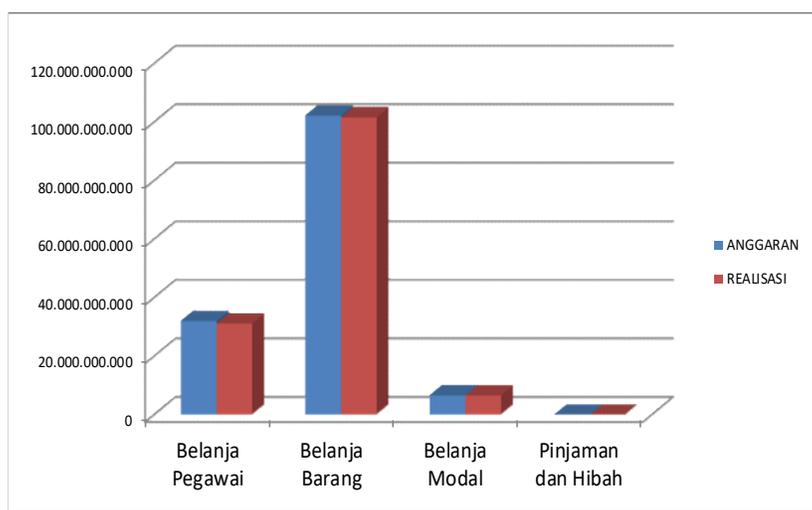
| URAIAN | 2021 | | % |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| Belanja Pegawai | 32.063.269.000 | 31.230.755.694 | 97,40 |
| Belanja Barang | 102.254.138.000 | 101.818.142.717 | 99,57 |
| Belanja Modal | 6.681.444.000 | 6.678.726.191 | 99,96 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Belanja Kotor | 140.998.851.000 | 139.727.624.602 | 99,10 |
| Pengembalian Belanja | | (149.485.664) | 0,00 |
| Total Belanja | 140.998.851.000 | 139.578.138.938 | 98,99 |

Rincian Pengembalian Belanja TA 2021

| SATUAN KERJA | 2021 | | % |
|--|------------------------|--------------------|-------------|
| | ANGGARAN | PENGEMBALIAN | |
| Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda | 17.571.344.000 | 36.440.359 | 0,21 |
| Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 30.369.097.000 | 951 | 0,00 |
| Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | 26.190.807.000 | 2.161.577 | 0,01 |
| Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara | 21.024.386.000 | 103.206.576 | 0,49 |
| Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan | 45.843.217.000 | 7.676.201 | 0,02 |
| Sub Total | 140.998.851.000 | 149.485.664 | 0,11 |

Pengembalian Belanja berasal dari kelebihan pembayaran selama Tahun Anggaran 2021 dengan rincian terlampir.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2021

| KEGIATAN | 2021 | | % |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda | 17.571.344.000 | 17.548.596.866 | 99,87 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 30.369.097.000 | 29.722.289.940 | 97,87 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | 26.190.807.000 | 25.807.617.605 | 98,54 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara | 21.024.386.000 | 20.809.852.724 | 98,98 |
| Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan | 45.843.217.000 | 45.839.267.467 | 99,99 |
| Sub Total | 140.998.851.000 | 139.727.624.602 | 99,10 |
| Pengembalian Belanja | | - 149.485.664 | |
| Total Belanja | 140.998.851.000 | 139.578.138.938 | 98,99 |

Belanja Pegawai

Rp.

31.226.146.586

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.226.146.586,- dan Rp. 26.931.951.693,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dikarenakan adanya penambahan 71 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kenaikan gaji pegawai Badan Litbang Perhubungan.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Litbang Perhubungan merupakan Pembayaran gaji untuk 232 Pegawai dengan rincian sebagai berikut

Range Gaji Pegawai Badan Litbang TA 2021

| Golongan | Jumlah Pegawai | Range Gaji |
|----------|----------------|-----------------------|
| II | 28 | 2.022.200 - 3.820.000 |
| III | 164 | 2.579.400 - 4.797.000 |
| IV | 41 | 3.044.300 - 5.901.200 |

*Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan
Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan*

| NO | URAIAN KELAS JABATAN | JUMLAH PENERIMA | TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN | 1. JUMLAH TUNJANGAN | | |
|----|-------------------------|--------------------|---|---------------------|------------|-------------|
| | | | | 2. PAJAK | | |
| | | | | 3. JUMLAH | | |
| 1 | 17 | 1 | 33.240.000 | 33.240.000 | 6.722.259 | 39.962.259 |
| | | | | 96.400.000 | 14.666.738 | 111.066.738 |
| | | | | 32.808.000 | 4.921.200 | 37.729.200 |
| 2 | 15 | 5 | 19.280.000 | 118.752.000 | 13.209.642 | 131.961.642 |
| | | | | 131.364.000 | 17.380.615 | 148.744.615 |
| | | | | 238.722.400 | 12.970.083 | 251.692.483 |
| 3 | 13 | 3 | 10.936.000 | 87.307.850 | 3.572.118 | 90.879.968 |
| | | | | 394.727.760 | 6.836.958 | 401.564.718 |
| | | | | 49.145.600 | 501.572 | 49.647.172 |
| 4 | 12 | 12 | 9.896.000 | 3.134.250 | 84.820 | 87.954.270 |
| | | | | 3.134.250 | 84.820 | 3.219.070 |
| | | | | | | |
| 5 | 11 | 15 | 8.757.600 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6 | 09 | 47 | 5.079.200 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 | 08 | 19 | 4.595.150 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 | 07 | 114 | 3.915.950 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 06 | 15 | 3.510.400 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | 05 | 1 | 3.134.250 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI TA 2021 | REALISASI TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 15.873.850.045 | 13.317.606.492 | 19,19 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS | 0 | 0 | |
| Belanja Honorarium | 0 | 0 | |
| Belanja Lembur | 5.097.000 | 434.459.000 | (98,83) |
| Belanja Tunj.Khusus | 15.351.808.649 | 13.179.886.759 | 16,48 |
| Jumlah Belanja Kotor | 31.230.755.694 | 26.931.952.251 | 15,96 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | (4.609.108) | (558) | 825.905,02 |
| Jumlah Belanja | 31.226.146.586 | 26.931.951.693 | 15,94 |

Rincian realisasi belanja pegawai per satuan kerja di Badan Litbang pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | ANGGARAN T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2021 | % |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 8.951.793.000 | 8.947.394.930 | 99,95 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | 6.005.200.000 | 5.659.712.929 | 94,25 |
| Puslitbang Transportasi Udara | 4.873.558.000 | 4.678.806.051 | 96,00 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 7.012.141.000 | 6.721.850.611 | 95,86 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | 5.220.577.000 | 5.218.382.065 | 99,96 |
| Jumlah | 32.063.269.000 | 31.226.146.586 | 97,39 |

Terdapat pengembalian belanja pegawai di tahun 2021 sebesar Rp. 4.609.108,- yang berasal dari pengembalian belanja gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan umum dan uang makan PNS, rincian sebagai berikut:

| URAIAN | ANGGARAN T.A. 2021 | PENGEMBALIAN T.A. 2021 | % |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 8.951.793.000 | 2.306.201 | 0,03 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | 6.005.200.000 | 2.161.577 | 0,04 |
| Puslitbang Transportasi Udara | 4.873.558.000 | 140.379 | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 7.012.141.000 | 951 | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | 5.220.577.000 | - | 0,00 |
| Jumlah | 32.063.269.000 | 4.609.108 | 0,01 |

Belanja Barang

Rp.

101.673.266.161,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 101.673.266.161,- dan Rp. 110.330.817.072,-.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI TA 2021 | REALISASI TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Belanja Barang Operasional | 9.361.518.639 | 6.667.280.453 | 40,41 |
| Belanja Barang Non Operasional | 27.667.262.784 | 31.120.881.657 | (11,10) |
| Belanja Persediaan | 2.821.144.815 | 3.844.896.001 | (26,63) |
| Belanja Jasa | 29.545.281.762 | 34.305.876.428 | (13,88) |
| Belanja Pemeliharaan | 3.613.945.613 | 2.518.207.093 | 43,51 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 28.808.989.104 | 31.729.464.216 | (9,20) |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri | - | 204.346.824 | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 101.818.142.717 | 110.390.952.672 | (7,77) |
| Pengembalian Belanja | (144.876.556) | (60.135.600) | |
| Jumlah Belanja | 101.673.266.161 | 110.330.817.072 | (7,85) |

Rincian Belanja Barang Dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 (menggunakan akun khusus COVID-19)

| Akun | Jenis Belanja | 2021 | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi |
| 521131 | Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 | 3.518.577.000 | 3.516.599.131 |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 | 1.462.055.000 | 1.239.434.708 |
| 522192 | Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 | 1.075.960.000 | 1.075.958.917 |
| Jumlah | | 6.056.592.000 | 5.831.992.756 |

Jika dilihat dari total realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 7,85% dibanding Tahun 2020 karena menyesuaikan kebutuhan Tahun Anggaran 2021.

Rincian realisasi belanja barang per satuan kerja di Badan Litbang pada 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| URAIAN | ANGGARAN T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2021 | % |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 30.309.980.000 | 30.304.145.545 | 99,98 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | 20.085.607.000 | 20.047.067.699 | 99,81 |
| Puslitbang Transportasi Udara | 16.150.828.000 | 16.027.840.097 | 99,24 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 23.356.956.000 | 23.000.438.378 | 98,47 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | 12.350.767.000 | 12.293.774.442 | 99,54 |
| Jumlah | 102.254.138.000 | 101.673.266.161 | 99,43 |

Realisasi Belanja Barang Badan Litbang Perhubungan pada TA 2021 sebesar 36,15% adalah berupa belanja kegiatan kajian penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Skema Swakelola Tipe I (Non Perorangan) TA 2021

| Skema Swakelola Tipe I (Non Perorangan) | | | | |
|--|---|--|------------------|-----------------------|
| No | Unit Kerja | Judul | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Puslitbang Transportasi Antarmoda | Pengembangan Metode Pengumpulan Data ATTN Barang | 662.231.000 | 661.434.013 |
| 2 | Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | Kajian Penyelenggaraan <i>Autonomous Rail Rapid Transit (ART)</i> di Kota Denpasar | 1.862.984.000 | 1.861.242.424 |
| | | Kajian Penyelenggaraan <i>Autonomous Rail Rapid Transit (ART)</i> di Kota Surabaya | | |
| | | Kajian Penyelenggaraan <i>Autonomous Rail Rapid Transit (ART)</i> di Kota Yogyakarta | | |
| | | Regulasi Penyelenggaraan <i>Autonomous Rail Rapid Transit (ART)</i> di Indonesia | | |
| 3 | Puslitbang Transportasi Laut Sungai Danau Penyeberangan | Skema Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Sektor Transportasi Laut Melalui DAK | 430.718.000 | 430.717.991 |
| | | Evaluasi Pelayaran Perintis (Kebijakan Model dan Pengelolaan) | 543.506.000 | 543.505.045 |
| 4 | Puslitbang Transportasi Udara | Perencanaan Penyiapan Ruang Udara di Wilayah Ibu Kota Negara Untuk Mendukung Lalu Lintas Penerbangan | 436.698.000 | 436.011.885 |

Skema Swakelola Tipe I (Perorangan) TA 2021

| Skema Swakelola Tipe I (Perorangan) | | | |
|--|---|------------------|-----------------------|
| No | Unit Kerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Puslitbang Transportasi Antarmoda | 928.075.000 | 925.800.484 |
| 2 | Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 1.883.504.000 | 1.854.217.492 |
| 3 | Puslitbang Transportasi Laut Sungai Danau Penyeberangan | 1.076.350.000 | 1.074.877.188 |
| 4 | Puslitbang Transportasi Udara | 1.289.938.000 | 1.289.776.130 |

Skema Swakelola Tipe II (Kerjasama) TA 2021

| Skema Swakelola Tipe II/Kerjasama | | | |
|---|---|-------------|------------------|
| No | Judul | Pagu | Realisasi |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | | | |
| 1 | Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Palembang | 843.231.000 | 843.228.728 |
| 2 | Integrasi Jaringan Prasarana Transportasi Dalam Rangka Pengembangan Stasiun Manggarai sebagai <i>Central Station</i> | 475.860.000 | 475.846.760 |
| 3 | Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Kawasan Pariwisata | 781.158.000 | 781.154.000 |
| 4 | Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Logistik | 714.565.000 | 714.559.135 |
| 5 | Distribusi Logistik Dalam Rangka Mendukung Konektivitas dan Ekonomi Wilayah (<i>Modal Share</i> dan Konektivitas Distribusi Logistik) | 635.481.000 | 632.889.990 |
| 6 | Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemulihan Sektor Angkutan Logistik Selama Masa dan Pasca PSBB | 668.140.000 | 668.138.000 |
| 7 | Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Kawasan Ibukota Negara dan Daerah Penyangga | 828.716.000 | 825.117.000 |
| 8 | Integrasi Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP) Kawasan Timur Indonesia | 586.440.000 | 584.702.200 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | | | |
| 1 | Evaluasi Sistem Persinyalan Perkeretaapian yang Mengintegrasikan Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian | 885.550.000 | 885.550.000 |
| 2 | Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Angkutan Muatan Barang dan Penumpang | 555.308.000 | 555.308.000 |
| 3 | Mitigasi dan Perumusan Bahan Standar Teknis Sistem Perlintasan Sebidang Perkeretaapian | 611.415.000 | 610.548.000 |
| 4 | Penyusunan Kajian Implementasi Dan Standar Serta Kriteria Sarana Angkutan Umum <i>Autonomous</i> Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN | 884.253.000 | 883.433.000 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| 5 | Perumusan Bahan Kebijakan Mekanisme <i>Buy The Service</i> Penyelenggaraan Angkutan Umum | 710.420.000 | 710.420.000 |
| 6 | Dampak Kebijakan dan Strategi Implementasi Penertiban <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL) | 770.000.000 | 770.000.000 |
| 7 | Penyusunan Standar Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Kereta Api | 715.006.000 | 714.649.000 |
| 8 | Perumusan Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2021 | 855.338.000 | 855.338.000 |
| 9 | Kaji Ulang Tata Kelola Organisasi Pengelola Terminal Penumpang | 654.190.000 | 654.190.000 |
| 10 | Evaluasi Standar Kompetensi SDM pada Bidang Jalan dan Perkeretaapian Berbasis Perkembangan Teknologi | 742.790.000 | 742.751.000 |
| 11 | Kaji Ulang UU 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Terhadap Skema Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Teknologi | 766.855.000 | 766.734.300 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, Penyeberangan | | | |
| 1 | Penyiapan SDM Kapal Untuk Menyongsong Teknologi Industri 4.0 | 601.139.000 | 601.138.100 |
| 2 | Kesiapan Perusahaan Pelayaran dan Perusahaan Keagenan Kapal di Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 | 570.208.000 | 570.207.596 |
| 3 | Potensi dan optimalisasi <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) dan <i>Traffic Separation Scheme</i> (TSS) terintegrasi di Perairan Indonesia | 690.643.000 | 690.642.900 |
| 4 | Realokasi Kapal Penyeberangan Milik GAPASDAP ke Wilayah Lintasan Penyeberangan Indonesia Bagian Timur | 685.621.000 | 685.620.340 |
| 5 | Potensi Pengoperasian dan Desain <i>Floating Wharf Barge</i> sebagai Infrastruktur Penunjang Ibukota Negara | 1.093.675.000 | 1.079.267.065 |
| 6 | Studi Evaluasi dan Optimasi Rute Toll Laut (Kebijakan dan Model Pengelolaan) | 848.063.000 | 848.061.644 |
| 7 | Kebijakan Kesiapan Galangan Kapal Dalam Mendukung Sektor Transportasi Laut | 673.105.000 | 673.104.966 |
| 8 | Potensi Pengoperasian <i>Floating Storage Barge</i> sebagai Infrastruktur Penunjang Wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan | 1.057.704.000 | 1.057.703.200 |
| 9 | Penggalian Informasi Sebagai Perspektif Penetapan Regulasi Penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan | 200.000.000 | 200.000.000 |

| Puslitbang Transportasi Udara | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem di Sekitar Bandar Udara Untuk Penanggulangan <i>Wildlife</i> | 757.179.000 | 757.074.777 |
| 2 | Pengaturan Pengoperasian <i>Waterbase</i> dan <i>Seaplane</i> di Indonesia | 822.662.000 | 822.645.620 |
| 3 | Pengaturan Pengoperasian UAF/ <i>Drone</i> di Kawasan Perkotaan | 673.187.000 | 673.073.500 |
| 4 | Strategi Penerbangan Indonesia dalam Peningkatan Fasilitas Keamanan dan Kesehatan Bandar Udara di Masa Covid-19 | 744.525.000 | 744.271.476 |
| 5 | Evaluasi Pengembangan Jaringan dan Rute Penerbangan di Indonesia | 728.622.000 | 728.569.046 |
| 6 | Kebijakan Pemanfaatan dan Pemilihan Sistem Energi Alternatif Sebagai Penunjang Operasi Bandara | 768.108.000 | 767.776.980 |
| 7 | Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara Internasional | 780.120.000 | 779.800.671 |
| 8 | Pengaturan Pemanfaatan <i>Drone</i> Untuk Distribusi Kargo Ke Wilayah Terpencil, Terluar, Tertinggal (3T) dan Wilayah Rawan Bencana | 747.638.000 | 747.516.706 |
| 9 | Strategi Penguatan Kelembagaan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Penerbangan | 726.025.000 | 725.942.759 |
| 10 | Pengembangan Aerotropolis di Wilayah Sekitar Ibukota Negara Baru | 851.433.000 | 851.351.955 |

Pada Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 144.876.556,- dengan rincian sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah) | | |
|---|--|--------------------------------|
| URAIAN | RINCIAN KEGIATAN | PENGEMBALIAN BELANJA T.A. 2021 |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | Pengembalian Perjalanan Dinas | 5.370.000 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | - | - |
| Puslitbang Transportasi Udara | Pengembalian Perjalanan Dinas | 860.000 |
| | Pengembalian Belanja Evaluasi Pengembangan Jaringan dan Rute Penerbangan di Indonesia | 4.822.206 |
| | Pengembalian Belanja Pemanfaatan Teknologi Drone Untuk Distribusi Kargo Ke Wilayah Terpencil, Terluar, Tertinggal (3T) dan Wilayah Rawan Bencana | 10.482.777 |
| | Pengembalian Belanja Kebijakan Pemanfaatan dan Pemilihan Sistem Energi Alternatif Sebagai Penunjang Operasi Bandara | 45.891.214 |
| | Pengembalian Belanja Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara Internasional | 41.010.000 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - | - |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | Pengembalian Belanja Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemulihan Sektor Angkutan Logistik pada masa dan Pasca Pembatasan Sosial Berkala | 36.440.359 |
| Jumlah | - | 144.876.556 |

Belanja Modal
Rp.6.678.726.191

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.678.726.191,- dan Rp. 18.182.206.301,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.362.071.968 | 11.415.951.664 | (61,79) |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan | 48.994.000 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 1.153.306.163 | 0,00 |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 2.072.091.223 | | 0,00 |
| Belanja Modal Lainnya | 195.569.000 | 382.745.000 | (48,90) |
| Belanja Modal BLU | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 6.678.726.191 | 18.182.206.301 | (63,27) |
| Pengembalian | - | 0 | - |
| Jumlah Belanja | 6.678.726.191 | 18.182.206.301 | (63,27) |

Rincian Modal Barang Dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19
(menggunakan akun khusus COVID-19)

| Akun | Jenis Belanja | 2021 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi |
| 532119 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 | 50.000.000 | 48.994.000 |
| Jumlah | | 50.000.000 | 48.994.000 |

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 63,27% dibandingkan TA 2020, hal ini disebabkan adanya penurunan Pagu Anggaran dari Tahun Anggaran 2021. Rincian realisasi belanja modal per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut :

| URAIAN | ANGGARAN T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2021 | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 6.581.444.000 | 6.580.050.791 | 99,98 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | 100.000.000 | 98.675.400 | 98,68 |
| Puslitbang Transportasi Udara | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | - | - | 0,00 |
| Jumlah | 6.681.444.000 | 6.678.726.191 | 99,96 |

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,., Badan Litbang Perhubungan sampai saat ini tidak memiliki asset tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020.

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | Naik (Turun) % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pembuatan Sertifikat | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 0 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0,00 |

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 4.411.065.968

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.411.065.968,- mengalami penurunan sebesar 61,36% bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 11.415.951.664. Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.362.071.968 | 11.415.951.664 | (61,79) |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan | 48.994.000 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 4.411.065.968 | 11.415.951.664 | (61,36) |
| Pengembalian | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 4.411.065.968 | 11.415.951.664 | (61,36) |

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut:

| URAIAN | ANGGARAN T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2021 | % |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 4.313.781.000 | 4.312.390.568 | 99,97 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | 100.000.000 | 98.675.400 | 98,68 |
| Puslitbang Transportasi Udara | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | - | - | 0,00 |
| Jumlah | 4.413.781.000 | 4.411.065.968 | 99,94 |

Belanja Modal
Gedung Bangunan
Rp. 2.072.091.223

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.072.091.223,- dan sebesar Rp. 0,.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | T.A. 2021 | T.A. 2020 | (Dalam Rupiah) |
|--|----------------------|-----------|----------------|
| | | | Naik (Turun) % |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan | 2.072.091.223 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 2.072.091.223 | 0 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 2.072.091.223 | 0 | 0,00 |

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, &
Jaringan
Rp.0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 5.230.203.474,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | T.A. 2021 | T.A. 2020 | Naik (Turun) % |
|---|-----------|----------------------|----------------|
| Belanja Modal Jaringan | 0 | 5.230.203.474 | 0,00 |
| Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 5.230.203.474 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 0 | 5.230.203.474 | 0,00 |

Belanja Modal
Lainnya
Rp. 195.569.000,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 195.569.000,- dan Rp. 382.745.000,-. Realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar 48,90% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan adanya penurunan pagu anggaran dari Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | T.A. 2021 | T.A. 2020 | Naik (Turun) % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Software | 195.569.000 | 382.745.000 | (48,90) |
| Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 195.569.000 | 382.745.000 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 195.569.000 | 382.745.000 | (48,90) |

| No. | Uraian | Nilai Perolehan |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Aplikasi Dashboard Pimpinan | 96.569.000 |
| 2 | E-Survey | 99.000.000 |
| Jumlah | | 195.569.000 |

Rincian realisasi belanja modal lainnya per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut:

| URAIAN | ANGGARAN T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2021 | % |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 195.569.000 | 195.569.000 | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Udara | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - | - | 0,00 |
| Puslitbang Transportasi Antarmoda | - | - | 0,00 |
| Jumlah | 195.569.000 | 195.569.000 | 100,00 |

Belanja modal lainnya berupa Pengadaan Aplikasi pada satker Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | T.A. 2021 | T.A. 2020 | Naik (Turun) % |
|--|-----------|-----------|-------------------|
| Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0,00 |

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2021 dan TA 2020*

| Keterangan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|------------------------------|------------|------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | - | - |
| Jumlah | - | - |

Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| | (Dalam Rupiah) |
|--|----------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | - |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | - |
| Jumlah | - |

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2021 dan TA 2020*

| Keterangan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---------------|------------|------------|
| Uang Tunai | - | - |
| Rekening Bank | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2021 Dan TA 2020*

| Keterangan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | - | - |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | - | - |
| Kas Lainnya dari Hibah | - | - |
| Jumlah | - | - |

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| | | (Dalam Rupiah) |
|--|------------|----------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 | |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | - | |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - | |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | - | |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | - | |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | - | |
| Jumlah | - | |

*Piutang PNB
Rp.0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2021 dan 2020

| Uraian | TH 2021 | TH 2020 |
|-----------------|----------|----------|
| Piutang PNBP | - | - |
| Piutang Lainnya | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2021 dan 2020*

| No | Nama | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | Bagian Lancar TP | - | - |
| 2 | Bagian Lancar TGR | - | - |
| Jumlah | | - | - |

*Bagian Lancar TPA
Rp.0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar Rp.0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
TA 2021

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Piutang Bukan Pajak | | | |
| Lancar | - | 0% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TPA | | | |
| Lancar | - | 0% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | | - |

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- . Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2021 dan 2020

| JENIS | TH 2021 | TH 2020 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Pembayaran Internet | - | - |
| Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin | - | - |
| Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan | - | - |
| Jumlah | - | - |

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA
2021 dan 2020*

| JENIS | TH 2021 | TH 2020 |
|--|----------|----------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan | - | - |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | - | - |
| Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan | - | - |
| Jumlah | - | - |

Persediaan
Rp. 21.219.400,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 21.219.400,- dan Rp. 42.215.145,.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

| | | | (Dalam Rupiah) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| JENIS | TH 2021 | TH 2020 | Mutasi |
| Barang Konsumsi | 21.219.400 | 42.215.145 | (20.995.745) |
| Bahan Baku | | - | - |
| Suku Cadang | | - | - |
| Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat | - | - | - |
| Persediaan Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | 21.219.400 | 42.215.145 | (20.995.745) |

Rincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Litbang
Perhubungan sebagai berikut :

| | | (Dalam Rupiah) |
|------------------------|--------|-------------------|
| JENIS | JUMLAH | NILAI |
| BARANG KONSUMSI | | |
| Alat Tulis | | 486.550 |
| Penjepit Kertas | | 157.500 |
| buku tulis | | 189.000 |
| ordner dan map | | 2.730.703 |
| cutter (atk) | | 577.200 |
| alat perekat | | 12.500 |
| staples | | 530.200 |
| Isi Staples | | 1.792.000 |
| ATK lainnya | | 2.135.197 |
| Kertas HVS | | 8.699.900 |
| berbagai kertas | | 954.850 |
| Amplop | | 488.500 |
| Tinta Cetak | | 951.500 |
| Tinta/Toner Printer | | 635.800 |
| Bahan Komputer Lainnya | | 143.000 |
| Batu Baterai | | 660.000 |
| penghapus/Korektor | | 75.000 |
| T O T A L | | 21.219.400 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| | | (Dalam Rupiah) |
|--|------------|-------------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 | |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | | 4.281.050 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | | 1.106.500 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | | 14.656.650 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | | 1.056.400 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | | 118.800 |
| Jumlah | | 21.219.400 |

Persediaan yang
belum diregister
Rp.0

C.10.1. Persediaan Yang Belum Diregister

Persediaan yang belum diregister terjadi karena kesalahan akun realisasi belanja pada kegiatan pemeliharaan (akun 523112 belanja persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan akun 523123 belanja persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin). Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2021 dan 31

Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah) | | |
|---|----------|----------|
| Jenis | TH 2021 | TH 2020 |
| Barang untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | - | - |
| Barang untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | - | - |
| Jumlah | - | - |

Nilai Persediaan yang belum diregister per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah) | |
|--|------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | - |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | - |
| Jumlah | - |

*Tagihan TP/TGR
Rp. 0.*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp. 0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-Piutang
Non Lancar Rp. 0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar TA
2021*

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Tagihan PA | | | |
| Lancar | - | 0% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | | 0% | - |
| Macet | | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | | - |

Tanah Rp. 0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Litbang Perhubungan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|----------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | Rp | - |
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | - |
| Hibah | Rp | - |
| Reklasifikasi | Rp | - |
| Mutasi kurang: | Rp | - |
| Revaluasi Aset | Rp | - |
| Penghapusan | Rp | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | Rp | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | Rp | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | Rp | - |

Peralatan dan Mesin
Rp. 65.826.805.591

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.65.826.805.591,- dan Rp. 64.756.736.953,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | Rp | 64.756.736.953 |
|---|-----------|-----------------------|
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | 4.411.065.968 |
| Hibah | Rp | - |
| Transfer Masuk | Rp | 2.254.901.000 |
| Penggunaan Kembali Aset Tetap | Rp | 237.000.000 |
| Koreksi Tambah | Rp | - |
| Mutasi kurang: | | |
| Penghentian aset dari penggunaan | Rp | (237.000.000) |
| Reklasifikasi keluar | Rp | - |
| Penghapusan | Rp | (5.595.898.330) |
| Saldo per 31 Desember 2021 | Rp | 65.826.805.591 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | Rp | (47.194.007.786) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | Rp | 18.632.797.805 |

Mutasi tambah pada peralatan mesin berupa Transfer Masuk Gedung dan Lift Dirjen Perhubungan Laut kepada Badan Litbang Perhubungan sesuai BAST No: PL.301/6/18/DJPL/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Penggunaan Kembali aset tetap berupa kendaraan pada Satuan Kerja Puslitbang Transportasi Laut Sungai Danau dan Penyeberangan pada Pada 2020, aset kendaraan tersebut dihentikan penggunaan untuk diusulkan penghapusan. Tapi belum laku terjual. Pada 2021 akan dilakukan pengusulan penghapusan lagi, namun keadaan mobil sudah rusak berat, jadi harus dilakukan perubahan kondisi. Karna aset sudah di aset tdop, tidak bisa dilakukan perubahan kondisi, aset tersebut direklas masuk ke aset tetap lagi kemudian diubah kondisi menjadi rusak berat sehingga secara otomatis ke reklas keluar ke akun aset tdop kembali.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah) | |
|---|-----------------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 29.599.851.397 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 18.089.965.900 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, dan SDP | 6.748.909.657 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 5.477.412.082 |
| Pusat Litbang Transportasi Antarmoda | 5.910.666.555 |
| Jumlah | 65.826.805.591 |

Gedung dan
Bangunan
Rp.46.605.855.025

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.46.605.855.025,- dan Rp. 38.929.819.413,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| Saldo per 31 Desember 2020 | 38.929.819.413 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Mutasi tambah: | |
| Penambahan Nilai Gedung | 2.072.091.223 |
| Transfer masuk (Perpustakaan) | 1.529.291.204 |
| Transfer masuk (ATR) | 76.590.635 |
| Transfer masuk (ATR) | 2.389.599.550 |
| Transfer masuk (ATR) | 1.608.463.000 |
| Koreksi pencatatan | |
| Mutasi kurang: | |
| Koreksi pencatatan | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 46.605.855.025 |

Mutasi tambah Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp. 3.677.973.062 terdiri dari :

- a. Rp. 3.601.382.427
- b. Rp. 76.590.635
- c. Rp. 2.389.599.550
- d. Rp. 1.608.463.000

Nilai sebesar (a) merupakan transfer masuk dari DJL sesuai BAST No.PL.301/6/18/DJPL/2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah Pengembangan Gedung Perpustakaan dan Lift dari Dirjen Perhubungan Laut, (b) transfer masuk Aset Tetap Renovasi dari BPSDM sesuai BAST No: BA.48/BPSDM-2021 tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana dengan (BAST terlampir), (c) transfer masuk Aset Tetap Renovasi dari KNKT sesuai BAST No: BAST/ATR/XII/KNKT 2021

tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dengan (BAST terlampir), (d) transfer masuk Aset Tetap Renovasi dari BPSDM sesuai BAST No: BA.185 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana dengan (BAST terlampir).

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.13.687.694.174,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.687.694.174,- dan Rp. 13.687.694.174,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan listrik.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------------|
| Saldo per 31 Desember 2020 | Rp 13.687.694.174 |
| Mutasi tambah: | |
| Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi | Rp - |
| Pengembangan Jaringan Listrik | Rp - |
| Mutasi kurang: | |
| Koreksi pencatatan | Rp - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | Rp 13.687.694.174 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | Rp (966.079.707) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | Rp 12.721.614.467 |

Aset Tetap Lainnya
Rp. 3.522.153.447

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 3.522.153.447,- dan Rp. 3.522.153.447,-.

| | |
|--|-------------------------|
| Saldo per 31 Desember 2020 | Rp 3.522.153.447 |
| Mutasi tambah: | |
| Penambahan Aset Tetap Lainnya | Rp - |
| Mutasi kurang: | |
| Koreksi nilai | Rp - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | Rp 3.522.153.447 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | Rp - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | Rp 3.522.153.447 |

Aset Tetap Lainnya berupa Pembelian Buku Perpustakaan (monografi) pada satker Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai referensi para peneliti/perekayasa. Rincian Aset Tetap Lainnya per satker di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 2.506.522.165 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 236.146.790 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 51.088.250 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 410.506.030 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 317.890.212 |
| Jumlah | 3.522.153.447 |

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp. 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(52.974.785.528)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. (52.974.785.528),- dan Rp. (50.903.173.433),-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 65.826.805.591 | (47.194.007.786) | 18.632.797.805 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 46.605.855.025 | (4.814.698.035) | 41.791.156.990 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 13.687.694.174 | (966.079.707) | 12.721.614.467 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 3.522.153.447 | - | 3.522.153.447 |
| Akumulasi Penyusutan | | 129.642.508.237 | (52.974.785.528) | 76.667.722.709 |

Aset Tak Berwujud
Rp. 2.263.384.000,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.263.384.000,- dan Rp. 2.067.815.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Software Komputer | Rp 2.263.384.000 |
| 2 | Lisensi | |
| 3 | Hasil Kajian/Penelitian | |
| Jumlah Nilai | | Rp 2.263.384.000 |

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Saldo per 31 Desember 2020 | Rp | 2.067.815.000 |
| Mutasi tambah: | | |
| pembelian | Rp | 195.569.000 |
| Reklasifikasi Masuk | Rp | - |
| Mutasi kurang: | | |
| Reklasifikasi Keluar | Rp | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | Rp | 2.263.384.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021 | Rp | (1.297.295.501) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | Rp | 966.088.499 |

Mutasi tambah adalah pembelian Aplikasi Dashboard Pimpinan dan E-Survey.

Aset tak berwujud per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|---|----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 1.428.364.000 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberanga | 263.950.000 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | - |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 571.070.000 |
| Jumlah | 2.263.384.000 |

Rincian Aset Tak Berwujud tersaji pada lampiran (*software* komputer)

Aset Lain-Lain

Rp.4.489.769.330,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.4.489.769.330,- dan Rp. 5.351.689.405,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Litbang Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset lain-lain terdiri dari dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 5.351.689.405 |
| Mutasi tambah: | |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | 5.832.898.330 |
| Mutasi kurang: | |
| Penghapusan Dengan Cara Lelang | (2.065.607.500) |
| Penghapusan Dengan Cara Pemusnahan | (4.629.210.905) |
| Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) | - |
| Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikar | - |
| Penghapusan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintah | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 4.489.769.330 |

Mutasi kurang berasal dari transaksi penghapusan dengan cara lelang berupa berupa kendaraan bermotor dengan rincian terlampir.

Penghapusan dengan cara pemusnahan merupakan Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan berupa Software dan Lisensi sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No: KP.579 Tahun 2021.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud
Rp.(1.297.295.501,-)

C.23.1 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (1.297.295.501),- dan Rp. (891.244.276),-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

| No | Aset Tak Berwujud | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|----|-------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Software | Rp 2.263.384.000 | Rp (1.297.295.501) | Rp 966.088.499 |

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain
Rp.(4.477.747.249)

C.23.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (4.477.747.249),- dan Rp. (2.291.214.151),-. Nilai akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah berkurang senilai Rp.4.530.188.905,- dikarenakan adanya penghapusan. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lain lain adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

| No | Aset Lain-lain | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|---------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah | Rp 4.489.769.330 | Rp (4.477.747.249) | Rp 12.022.081 |
| Jumlah | | 4.489.769.330 | (4.477.747.249) | 12.022.081 |

Uang Muka dari KPPN Rp 0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN
Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.
Saldo Uang Muka dari KPPN per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | - |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | - |
| Jumlah | - |

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.61.914.000*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 61.914.000,- dan Rp. 46.539.000,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga tahun 2021 merupakan Beban Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp. 0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

*Beban yang Masih
harus Dibayar
Rp. 0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp.77.605.138.689*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.605.138.689,- dan Rp. 71.253.603.288,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Ekuitas per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|---|-----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 70.520.654.525 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 2.455.118.807 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, dan SDP | 1.264.091.232 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 1.808.554.022 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 1.556.720.103 |
| Jumlah | 77.605.138.689 |

Pendapatan PNB
Rp.536.479.368,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.536.479.368,- dan Rp. 327.316,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | % Naik (TURUN) |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Pendapatan PNB Lainnya | 536.479.368 | 327.316 | 163.803 |
| Pendapatan Jasa | | | |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan | - | - | - |
| Pendapatan Lain-Lain | - | - | - |
| Jumlah | 536.479.368 | 327.316 | 163.803 |

Beban Pegawai
Rp. 31.241.521.586,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.241.521.586,- dan Rp. 26.978.490.693,-.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan PNS | 31.241.521.586 | 26.978.490.693 | 15,80 |
| Beban Honorarium dan Vakasi | - | - | - |
| Beban Lembur | - | - | - |
| Jumlah | 31.241.521.586 | 26.978.490.693 | 15,80 |

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|-----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 9.009.308.930 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 6.721.850.611 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 5.653.283.929 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 4.678.806.051 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 5.178.272.065 |
| Jumlah | 31.241.521.586 |

Beban Persediaan
Rp. 2.842.140.560,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.842.140.560,- dan Rp 3.831.175.179,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 2.842.140.560 | 3.831.175.179 | (25,82) |
| Beban Persediaan Bahan Baku | - | - | - |
| Beban Persediaan Lainnya | - | - | - |
| Jumlah Beban Persediaan | 2.842.140.560 | 3.831.175.179 | (25,82) |

Beban Persediaan per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 475.922.085 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 715.857.200 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 488.892.000 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 485.768.975 |
| Pusat Litbang Transportasi Antarmoda | 675.700.300 |
| Jumlah | 2.842.140.560 |

*Beban Barang
dan Jasa*
Rp. 66.435.416.629,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 66.435.416.629,- dan Rp. 72.047.138.538,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | % Naik (TURUN) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 4.173.068.825 | 3.530.242.202 | 18,21 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 222.867.202 | 258.247.010 | (13,70) |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5.330.700 | 144.000 | 3.601,88 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 946.060.000 | 970.658.500 | (2,53) |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 497.592.781 | 424.671.000 | 17,17 |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 | 3.516.599.131 | 1.483.317.741 | 137,08 |
| Beban Bahan | 6.610.573.611 | 6.679.735.042 | (1,04) |
| Beban Honor Output Kegiatan | 6.644.488.710 | 6.658.745.925 | (0,21) |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 13.172.765.755 | 16.542.735.823 | (20,37) |
| Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 | 1.239.434.708 | 1.239.664.867 | (0,02) |
| Beban Langganan Listrik | 2.699.114.093 | 2.581.882.947 | 4,54 |
| Beban Langgan Telepon | 301.564.092 | 126.843.724 | 137,74 |
| Beban Langganan Air | 277.513.210 | 186.438.520 | 48,85 |
| Beban Langganan Daya dan Jasa | 489.391.908 | 264.106.798 | 85,30 |
| Beban Jasa Konsultan | 859.523.000 | 7.981.517.500 | (89,23) |
| Beban Sewa | 986.555.000 | 268.418.900 | 267,54 |
| Beban Jasa Profesi | 4.152.935.000 | 11.691.609.500 | (64,48) |
| Beban Jasa Lainnya | 18.702.726.542 | 10.153.184.910 | 84,21 |
| Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID 19 | 1.075.958.917 | 1.051.873.629 | 2,29 |
| Jumlah | 66.574.063.185 | 72.094.038.538 | (7,66) |
| Pengembalian Beban Jasa Konsultan | - | (46.000.000) | (100,00) |
| Pengembalian Beban Jasa Profesi | - | (900.000) | (100,00) |
| Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya | (102.206.197) | - | - |
| Pengembalian Beban Jasa Lainnya | (36.440.359) | - | - |
| Jumlah | 66.435.416.629 | 72.047.138.538 | (7,79) |

Beban Barang dan Jasa per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Nilai |
|--|-----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 20.155.685.233 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 15.745.989.446 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 11.134.117.944 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 10.955.783.777 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 8.443.840.229 |
| Jumlah | 66.435.416.629 |

Beban
Pemeliharaan
Rp. 3.613.945.613,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.613.945.613,- dan Rp. 2.437.522.093,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | % Naik (TURUN) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.830.458.433 | 1.043.980.055 | (42,97) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.783.487.180 | 1.363.157.038 | (23,57) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lair | - | 30.220.000 | - |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | | 165.000 | |
| Jumlah | 3.613.945.613 | 2.437.522.093 | (32,55) |

Beban pemeliharaan per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Nilai |
|--|----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 2.415.686.917 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 289.980.631 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 521.447.000 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 245.418.429 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 141.412.636 |
| Jumlah | 3.613.945.613 |

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 28.802.759.104,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.802.759.104,- dan Rp. 31.920.575.440,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 16.047.867.380 | 26.709.973.967 | - 40 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58.955.000 | 340.775.652 | - 83 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 1.117.282.000 | 391.620.000 | 185 |
| Beban Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19 | - | 596.550.000 | - 100 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket meeting luar kota | 11.584.884.724 | 3.677.308.997 | 215 |
| Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri | - | 204.346.824 | - 100 |
| Jumlah | 28.808.989.104 | 31.920.575.440 | - 10 |
| Pengembalian Beban Perjalanan Biasa | - 3.710.000 | - | - |
| Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - 2.520.000 | - | - |
| Jumlah | 28.802.759.104 | 31.920.575.440 | - 10 |

Beban Perjalanan Dinas per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Nilai |
|--|-----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 7.262.200.130 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 6.248.700.301 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 7.916.790.005 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 4.342.104.391 |
| Pusat Litbang Transportasi Antarmoda | 3.032.964.277 |
| Jumlah | 28.802.759.104 |

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Litbang Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman instansi di daerah dan masyarakat mengenai tatanan transportasi yang handal.

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) |
|--|----------|----------|-----------------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0,00 |

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | - |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | - |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | - |
| Jumlah | - |

*Beban Bantuan
Sosial Rp. 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | % Naik (TURUN) |
|--|----------|----------|-------------------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | - | - | - |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | - | - | - |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.7.587.692.101*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.587.692.101,- dan Rp. 6.895.996.675,-.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | TH 2021 | TH 2020 | % Naik (TURUN) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 5.694.211.520 | 5.314.592.056 | 7,14 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1.101.659.599 | 932.372.458 | 18,16 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 383.932.473 | 383.658.651 | 0,07 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Jumlah Penyusutan | 7.179.803.592 | 6.630.623.165 | 8,28 |
| Beban Amortisasi Software | 381.582.375 | 203.036.876 | 87,94 |
| Beban Amortisasi Lisensi | - | 67.258.000 | (100,00) |
| Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 24.755.500 | (6.472.000) | - |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 1.550.634 | 1.550.634 | - |
| Jumlah Amortisasi | 407.888.509 | 265.373.510 | 53,70 |
| Beban Penyusutan Aset Lain-lain | - | - | - |
| Jumlah | 7.587.692.101 | 6.895.996.675 | 10,03 |

Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 4.957.447.344 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 1.019.656.283 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 672.381.894 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 469.829.079 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 468.377.501 |
| Jumlah | 7.587.692.101 |

Beban Penyisihan
Piutang Tak
tertagih Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | % Naik (TURUN) |
|--|----------|----------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar | - | - | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 731.176.306

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2021 dan TA 2020*

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | % NAIK (TURUN) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 617.977.993 | 434.374.597 | 42,27 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | (74.266.500) | (39.014.940.525) | (99,81) |
| Defisit Selsih Kurs | 0 | 0 | 0,00 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 187.464.813 | 1.353.918.468 | (86,15) |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | - | (45.042.884) | (100,00) |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 731.176.306 | (37.271.690.344) | (101,96) |

*) *Pendapatan/Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Penyesuaian Nilai Persediaan yang timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2019.*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Nilai |
|--|--------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 290.471.917 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 182.896.604 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 132.000.000 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 95.168.168 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 30.639.617 |
| Jumlah | 731.176.306 |

Pos-Pos Luar Biasa
Rp. 0

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | % NAIK (TURUN) |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Pendapatan PNBPN | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0,00 |
| Defisit Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0,00 |

Surplus/(Defisit)
Laporan Operasional
Rp. (139.255.819.919)

D.13 Surplus/(Defisit) LO

Surplus / (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat pada entitas. Rincian Surplus / (defisit) LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp. (139.255.819.919),- dan Rp. (181.382.261.646),-.

Surplus / (defisit) LO per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Nilai |
|---|--------------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | (43.449.907.722) |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | (30.559.137.868) |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, dan SDP | (26.254.304.404) |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | (21.082.542.534) |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | (17.909.927.391) |
| Jumlah | (139.255.819.919) |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 71.253.603.288

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.71.253.603.288,- dan Rp. 513.283.827.735,-.

Ekuitas awal per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|--|-----------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 61.668.441.842 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 3.474.864.290 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 1.845.547.976 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 2.279.618.576 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 1.985.130.604 |
| Jumlah | 71.253.603.288 |

Defisit LO
Rp.(139.255.819.919)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp. (139.255.819.919),- dan Rp. (181.382.261.646),-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LO per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
|---|--------------------------|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | (43.449.907.722) |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | (30.559.137.868) |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, dan SDP | (26.254.304.404) |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | (21.082.542.534) |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | (17.909.927.391) |
| Jumlah | (139.255.819.919) |

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp. 0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan

Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

| Jenis Persediaan | Koreksi |
|--------------------------------------|----------------|
| Barang Konsumsi | - |
| Suku Cadang | - |
| Barang Persediaan untuk Pemeliharaan | - |
| Barang Persediaan Lainnya | - |
| Jumlah | - |

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp. 0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Klasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp552.532.500,-.

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi

| Jenis Aset Tetap | Nilai Koreksi |
|---|----------------------|
| Koreksi Reklasifikasi Aset Tak Berwujud | - |
| Koreksi Reklasifikasi Peralatan dan Mesin | - |
| Jumlah | - |

Koreksi atas reklasifikasi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya transaksi reklasifikasi keluar - reklasifikasi masuk terhadap aset tak berwujud berupa lisensi yang tidak digunakan dalam Kegiatan Operasional di Reklasifikasi keluar dari lisensi dan di Reklasifikasi masuk menjadi Software Komputer.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp. 0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Koreksi Aset Non
Revaluasi
Rp.(60.876.271)

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.(60.876.271),- dan Rp. (414.915.732.323),-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Per 31 Desember 2021*

| Jenis Aset Tetap | Nilai Koreksi |
|-----------------------------------|---------------------|
| Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi | (60.876.271) |
| Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan | |
| Jumlah | (60.876.271) |

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah Aset Tetap Renovasi (ATR) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan senilai Rp. 76.590.635,- yang diterima dari BPSDM sesuai BAST No: BA.48/BPSDMP-2021 tanggal 28 Juni 2021. Renovasi Gedung yang dilaksanakan oleh BPSDM telah selesai pengerjaannya per tanggal 12 Desember 2020, sehingga telah mengalami penyusutan 1(satu) kali sebelum diserahkan kepada Sekretariat Badan Litbang. ATR tersebut kemudian dikoreksi pencatatan dan dikapitalisasikan terhadap nilai Gedung Kantor Permanen NUP 1 Sekretariat Badan Litbang. (rincian terlampir).

Koreksi Lain-lain
Rp. 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

| Jenis Beban | Jumlah Koreksi |
|--------------------|----------------|
| Koreksi Beban | - |
| Koreksi Pendapatan | - |
| Koreksi Piutang | - |
| Koreksi Kewajiban | - |
| Koreksi Hibah | - |
| Jumlah | - |

Transaksi Antar

Entitas

Rp. 145.668.231.591

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.145.668.231.591,- dan Rp. 153.715.237.022,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
|--|------------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | (1.341.922.174) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 139.578.138.938 |
| Transfer Masuk | 7.432.014.827 |
| Transfer Keluar | - |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - |
| Jumlah | 145.668.231.591 |

Nilai Transaksi Antar Entitas per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah) | |
|--|------------------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 52.362.996.676 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 29.539.392.385 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 25.672.847.660 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 20.611.477.980 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 17.481.516.890 |
| Jumlah | 145.668.231.591 |

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. (1.341.922.174),- sedangkan DKEL sebesar Rp. 139.578.138.938,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.432.014.827,-, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|----|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Gedung dan Bangunan | Kantor Ditjen Perhubungan Laut | 1.440.303.720 |
| 2 | Lift | Kantor Ditjen Perhubungan Laut | 1.932.772.286 |
| 3 | Aset Tetap Renovasi | BPSDM Kemenhub | 1.669.339.271 |
| 4 | Aset Tetap Renovasi | KNKT | 2.389.599.550 |
| | Jumlah | | 7.432.014.827 |

Transfer masuk BMN Gedung dan Bangunan Berita acara BAST No: PL.301/6/18/DJPL/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa Gedung kantor di Jalan Medan Merdeka Timur no 5 Jakarta Pusat . ATR berasal dari Transfer Masuk Kantor Pusbang Laut BPSDM Kementerian Perhubungan dengan Berita Acara Nomor BA.48/BPSDM-2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Nomor No: BA.185 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 serta transfer masuk Aset Tetap Renovasi dari KNKT sesuai BAST No: BAST/ATR/XII/KNKT 2021 tanggal 31 Desember 2021 pada satker Sekretariat Badan Litbang Perhubungan (rincian terlampir).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan

Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Penerima Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Pengesahan |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta | Uang | Rp - |
| 2 | Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta | Uang | Rp - |
| | | Barang | Rp - |
| Total Pengesahan | | | Rp - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah | | | Rp - |
| Jumlah | | | Rp - |

Ekuitas Akhir

Rp.77.605.138.689

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.605.138.689,- dan Rp. 71.253.603.288,-.

Nilai ekuitas akhir per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah) | |
|--|-----------------------|
| Satuan Kerja | Tahun 2021 |
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 70.520.654.525 |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 2.455.118.807 |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 1.264.091.232 |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | 1.808.554.022 |
| Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 1.556.720.103 |
| Jumlah | 77.605.138.689 |

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Litbang Perhubungan terdapat 5 (lima) satuan kerja dengan jumlah rekening masing-masing telah mendapat persetujuan dari KPPN Jakarta IV atas nama masing-masing Satuan Kerja Eselon II di satuan kerja terkait.

| No | Kantor/Satuan Kerja | Nomor Rekening | Bank |
|-----|--|------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 9891542887521000 | BNI 1946 |
| 2 | Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 9891544142671000 | BNI 1946 |
| 3 | Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | 9891542889441000 | BNI 1946 |
| 4 | Pusat Litbang Transportasi Udara | 9891542889511000 | BNI 1946 |
| 5 | Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | 8100126341711000 | Bank Mandiri |

Berdasarkan surat permohonan *cut-off dan* pemindahbukuan rekening satuan kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor KU.401/1/8-BLT-2021 Tanggal 27 April 2021 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan KU.401/1/9-BLT-2021 Tanggal 27 April 2021 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri. Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening telah disetujui oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan sesuai Surat Nomor S-803/PB.3/2021 Tanggal 28 April 2021 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

| No | Kantor/Satuan Kerja | Rekening Lama | Rekening VA |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | BPG 133 SEK BALITBANG KEMENHUB | BPG 133 SEK BALITBANG KEMENHUB |
| 2 | Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | BPG 133 PUSLITBANG TJP | BPG 133 PUSLITBANG TJP |
| 3 | Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | BPG 133 PUSLITBANG TLSDP | BPG 133 PUSLITBANG TLSDP |
| 4 | Pusat Litbang Transportasi Udara | BPG 133 TRANSPORTASI UDARA | BPG 133 TRANSPORTASI UDARA |
| 5 | Pusat Litbang Transportasi Antar Moda | BPG 133 PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA | BPG 133 PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA |

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Penjelasan COVID-19

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19, Badan Litbang melakukan beberapa langkah pencegahan di Lingkungan Internal. Beberapa upaya Pencegahan internal yang dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan di area gedung kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.

Anggaran untuk untuk Kegiatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan sejumlah Rp 6.106.592.000 (Enam Milyar Seratus Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk dalam DIPA Nomor : SP DIPA-022.11-0/2021 tanggal 23 November 2020 pada akun :

521131 Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 3.518.577.000

521241 Belanja Barang Non Operasional -Penanganan Pandemi Covid-19 dengan pagu sebesar Rp. 1.462.055.000

522192 Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 1.075.960.000

532119 Belanja Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000

Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 terlampir sebagai berikut :

| Akun | Jenis Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 | 3.518.577.000 | 3.516.599.131 | 100% |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1.462.055.000 | 1.239.434.708 | 85% |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1.075.960.000 | 1.075.958.917 | 100% |
| 532119 | Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19 | 50.000.000 | 48.994.000 | 98% |
| Jumlah | | 6.106.592.000 | 5.880.986.756 | 96% |

2. Transfer Masuk

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN antara Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Nomor BA.48/BPSDMP-2021, pada Senin 28 Juni Tahun 2021 telah diterima BMN berupa Aset Tetap dalam Renovasi (Renovasi Gedung Lantai 2 Sekretariat BPSDM Perhubungan) dengan nilai perolehan Rp. 76.590.635,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN antara Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Kantor Pusat Dirjen Perhubungan Laut BAST Nomor PL.301/6/18/DJPL/2021 tanggal 22 Oktober 2021 telah dilakukan serah terima BMN berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Elevator / Lift sesuai dengan daftar terlampir untuk dipergunakan dalam mendukung tugas dan fungsi

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN antara Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Nomor No: BA.185 Tahun 2021, pada Jumat 31 Desember Tahun 2021 telah diterima BMN berupa Aset Tetap dalam Renovasi (Pekerjaan Peningkatan Kualitas Ruang Kantor *Smart Office* Sekretariat BPSDM Perhubungan) dengan nilai perolehan Rp. 1.608.463.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN antara KNKT kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Nomor No:BAST/ATR/XII/KNKT 2021, pada Jumat 31 Desember Tahun 2021 telah diterima BMN berupa Aset Tetap dalam Renovasi (Revitalisasi peningkatan Tata Ruang Kantor KNKT) dengan nilai perolehan Rp. 2.389.599.550,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Penjelasan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Puslitbang Transportasi LSDP sebesar Rp. 132.608.368,- merupakan pendapatan Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penerimaan Kembali belanja tahun anggaran yang lalu merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2019 PT. Mitraplan Kons dan PT.Ecoplan Rekabumi Interconsult. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari potongan uang sewa rumah dinas bulan Januari sampai dengan Agustus 2021 dikarenakan masih mengikuti SKPP lama kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut Sungai Danau dan Penyeberangan Perhubungan.

4. Pejabat Pengelola Keuangan

Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 sebagai berikut:

| Satker / Jabatan | Nama |
|---|--|
| Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | |
| Kuasa Pengguna Anggaran | Pandu Yuniarto, A.TD., M.Eng., SE |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Ferdian Danu T, ST., M.Sc / Joshua Kevin, A.Md |
| Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM | Anggun Pitaloka, A.Md |
| Bendahara | Dyas Yusnanto |
| Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | |
| Kuasa Pengguna Anggaran | Eddy Gunawan, ATD., M.Eng.SC. |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Hartono, S.AP |
| Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM | Sri Hapsari Winahyu, SE., MT |
| Bendahara | Listifadah, S.Si., M.Sc |
| Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan | |
| Kuasa Pengguna Anggaran | Ir. Gunung Hutapea, M.M. |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Hendrik Marantino, S.T. |
| Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM | Kris Ferdiyanto, S.E. |
| Bendahara | Muhammad Rizal |
| Pusat Litbang Transportasi Udara | |
| Kuasa Pengguna Anggaran | Capt. Noviyanto Widadi, S.AP., M.M |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Ali Murthado, S.T. |
| Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM | Harry Yanto Lumban Batu, S.KOM., M. S |
| Bendahara | Vinny Isnania Astuti, A.Md. |
| Pusat Litbang Transportasi Antarmoda | |
| Kuasa Pengguna Anggaran | Dr. Ir. Makjen Sinaga, M.T. |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Irawati Andriani, S.E., M.T. |
| Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM | Didok Sencoko, A.Md. |
| Bendahara | Ganang Restu Bariadi |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 07/06/22 10:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

| NO | URAIAN | 2021 | | | | 2020 | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | 0 | | | | 0 |
| | PENERIMAAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 1,341,922,174 | 1,341,922,174 | 0 | 0 | 1,729,738,044 | 1,729,738,044 | 0 |
| | PENERIMAAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH | 0 | 1,341,922,174 | 1,341,922,174 | 0 | 0 | 1,729,738,044 | 1,729,738,044 | 0 |
| B | BELANJA | | | | 0 | | | | 0 |
| | BELANJA PEGAWAI | 32,063,269,000 | 31,226,146,586 | (837,122,414) | 97 | 28,108,891,000 | 26,931,951,693 | (1,176,939,307) | 96 |
| | BELANJA BARANG | 102,254,138,000 | 101,673,266,161 | (580,871,839) | 99 | 111,044,949,000 | 110,330,817,072 | (714,131,928) | 99 |
| | BELANJA MODAL | 6,681,444,000 | 6,678,726,191 | (2,717,809) | 100 | 18,193,237,000 | 18,182,206,301 | (11,030,699) | 100 |
| | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH BELANJA (B I + B II) | 140,998,851,000 | 139,578,138,938 | (1,420,712,062) | 99 | 157,347,077,000 | 155,444,975,066 | (1,902,101,934) | 99 |
| C | PEMBIAYAAN | | | | 0 | | | | 0 |

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:10 PM
lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Persediaan | 21,219,400 | 42,215,145 | (20,995,745) | (49.74) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 21,219,400 | 42,215,145 | (20,995,745) | (49.74) |
| ASET TETAP | | | | |
| Peralatan dan Mesin | 65,826,805,591 | 64,756,736,953 | 1,070,068,638 | 1.65 |
| Gedung dan Bangunan | 46,605,855,025 | 38,929,819,413 | 7,676,035,612 | 19.72 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 13,687,694,174 | 13,687,694,174 | 0 | 0.00 |
| Aset Tetap Lainnya | 3,522,153,447 | 3,522,153,447 | 0 | 0.00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (52,974,785,528) | (50,903,173,433) | (2,071,612,095) | 4.07 |
| JUMLAH ASET TETAP | 76,667,722,709 | 69,993,230,554 | 6,674,492,155 | 9.54 |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset Tak Berwujud | 2,263,384,000 | 2,067,815,000 | 195,569,000 | 9.46 |
| Aset Lain-lain | 4,489,769,330 | 5,351,689,405 | (861,920,075) | (16.11) |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (5,775,042,750) | (6,154,807,816) | 379,765,066 | (6.17) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 978,110,580 | 1,264,696,589 | (286,586,009) | (22.66) |
| JUMLAH ASET | 77,667,052,689 | 71,300,142,288 | 6,366,910,401 | 8.93 |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 61,914,000 | 46,539,000 | 15,375,000 | 33.04 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 61,914,000 | 46,539,000 | 15,375,000 | 33.04 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 61,914,000 | 46,539,000 | 15,375,000 | 33.04 |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 77,605,138,689 | 71,253,603,288 | 6,351,535,401 | 8.91 |
| JUMLAH EKUITAS | 77,605,138,689 | 71,253,603,288 | 6,351,535,401 | 8.91 |
| JUMLAH EKUITAS | 77,605,138,689 | 71,253,603,288 | 6,351,535,401 | 8.91 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 77,667,052,689 | 71,300,142,288 | 6,366,910,401 | 8.93 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:09 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 111611 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 |
| 0.0 | 111613 | Kas di Bendahara Pengeluaran TUP | 0 | 0 |
| 0.0 | 117111 | Barang Konsumsi | 21,219,400 | 0 |
| 0.0 | 117199 | Persediaan Lainnya | 0 | 0 |
| 0.0 | 117911 | Persediaan yang Belum Diregister | 0 | 0 |
| 0.0 | 132111 | Peralatan dan Mesin | 65,826,805,591 | 0 |
| 0.0 | 132211 | Peralatan dan Mesin Belum Diregister | 0 | 0 |
| 0.0 | 133111 | Gedung dan Bangunan | 46,605,855,025 | 0 |
| 0.0 | 133211 | Gedung dan Bangunan Belum Diregister | 0 | 0 |
| 0.0 | 134113 | Jaringan | 13,687,694,174 | 0 |
| 0.0 | 135121 | Aset Tetap Lainnya | 3,522,153,447 | 0 |
| 0.0 | 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 47,194,007,786 |
| 0.0 | 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 4,814,698,035 |
| 0.0 | 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | 0 | 966,079,707 |
| 0.0 | 162151 | Software | 2,263,384,000 | 0 |
| 0.0 | 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 0 | 0 |
| 0.0 | 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 4,489,769,330 | 0 |
| 0.0 | 166113 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 0 | 0 |
| 0.0 | 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0 | 4,477,747,249 |
| 0.0 | 169315 | Akumulasi Amortisasi Software | 0 | 1,297,295,501 |
| 0.0 | 169318 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 0 | 0 |
| 0.0 | 212111 | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | 0 | 61,914,000 |
| 0.0 | 219511 | Uang Muka dari KPPN | 0 | 0 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 139,578,138,938 |
| 0.0 | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | 1,341,922,174 | 0 |
| 0.0 | 313221 | Transfer Masuk | 0 | 7,432,014,827 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 71,253,603,288 |
| 0.0 | 391116 | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | 60,876,271 | 0 |
| 3.0 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 617,977,993 |
| 3.0 | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 536,479,368 |
| 3.0 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 3,928,724 |
| 3.0 | 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 183,536,089 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 10,196,615,580 | 0 |
| 3.1 | 511111 | Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS | 0 | 2,053,679 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 174,170 | 0 |
| 3.1 | 511119 | Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS | 0 | 3,009 |
| 3.0 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 678,752,214 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS | 191,910,106 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 716,290,000 | 0 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:09 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | 1,585,200,000 | 0 |
| 3.1 | 511124 | Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS | 0 | 2,160,000 |
| 3.0 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS | 120,358,535 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 581,677,440 | 0 |
| 3.1 | 511126 | Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS | 0 | 72,420 |
| 3.0 | 511129 | Beban Uang Makan PNS | 1,496,452,000 | 0 |
| 3.1 | 511129 | Pengembalian Beban Uang Makan PNS | 0 | 140,000 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 321,795,000 | 0 |
| 3.1 | 511151 | Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS | 0 | 180,000 |
| 3.0 | 512211 | Beban Uang Lembur | 5,097,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 15,351,808,649 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran | 4,173,068,825 | 0 |
| 3.0 | 521113 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 222,867,202 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5,330,700 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 946,060,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Beban Barang Operasional Lainnya | 497,592,781 | 0 |
| 3.0 | 521131 | Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 3,516,599,131 | 0 |
| 3.1 | 521131 | Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Beban Bahan | 6,610,573,611 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan | 6,644,488,710 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya | 13,172,765,755 | 0 |
| 3.1 | 521219 | Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya | 0 | 102,206,197 |
| 3.0 | 521241 | Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1,239,434,708 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Beban Langganan Listrik | 2,699,114,093 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Beban Langganan Telepon | 301,564,092 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Beban Langganan Air | 277,513,210 | 0 |
| 3.0 | 522119 | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 489,391,908 | 0 |
| 3.0 | 522131 | Beban Jasa Konsultan | 859,523,000 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Beban Sewa | 986,555,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Beban Jasa Profesi | 4,152,935,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Beban Jasa Lainnya | 18,702,726,542 | 0 |
| 3.1 | 522191 | Pengembalian Beban Jasa Lainnya | 0 | 36,440,359 |
| 3.0 | 522192 | Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1,075,958,917 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1,830,458,433 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,783,487,180 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Biasa | 16,047,867,380 | 0 |
| 3.1 | 524111 | Pengembalian Beban Perjalanan Biasa | 0 | 3,710,000 |
| 3.0 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58,955,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1,117,282,000 | 0 |
| 3.1 | 524114 | Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0 | 2,520,000 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:09 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 524119 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 11,584,884,724 | 0 |
| 3.0 | 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 5,694,211,520 | 0 |
| 3.0 | 591211 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1,101,659,599 | 0 |
| 3.0 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan | 383,932,473 | 0 |
| 3.0 | 592115 | Beban Amortisasi Software | 381,582,375 | 0 |
| 3.0 | 592118 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 24,755,500 | 0 |
| 3.0 | 592222 | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 1,550,634 | 0 |
| 3.0 | 593111 | Beban Persediaan konsumsi | 2,842,140,560 | 0 |
| 3.0 | 596111 | Beban Kerugian Pelepasan Aset | 74,266,500 | 0 |
| JUMLAH | | | 278,566,907,169 | 278,566,907,169 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 115612 | Piutang dari KPPN | 1,420,712,062 | 0 |
| 0.0 | 219711 | Utang Kepada KUN | 1,341,922,174 | 0 |
| 2.0 | 511111 | Allotment Belanja Gaji Pokok PNS | 0 | 10,455,682,000 |
| 2.0 | 511119 | Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS | 0 | 201,000 |
| 2.0 | 511121 | Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 0 | 689,376,000 |
| 2.0 | 511122 | Allotment Belanja Tunj. Anak PNS | 0 | 200,689,000 |
| 2.0 | 511123 | Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS | 0 | 737,695,000 |
| 2.0 | 511124 | Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS | 0 | 1,631,045,000 |
| 2.0 | 511125 | Allotment Belanja Tunj. PPh PNS | 0 | 130,349,000 |
| 2.0 | 511126 | Allotment Belanja Tunj. Beras PNS | 0 | 593,335,000 |
| 2.0 | 511129 | Allotment Belanja Uang Makan PNS | 0 | 1,643,181,000 |
| 2.0 | 511147 | Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri | 0 | 0 |
| 2.0 | 511151 | Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS | 0 | 334,875,000 |
| 2.0 | 512211 | Allotment Belanja Uang Lembur | 0 | 84,910,000 |
| 2.0 | 512411 | Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 0 | 15,561,931,000 |
| 2.0 | 521111 | Allotment Belanja Keperluan Perkantoran | 0 | 4,179,274,000 |
| 2.0 | 521113 | Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 0 | 222,868,000 |
| 2.0 | 521114 | Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 0 | 7,150,000 |
| 2.0 | 521115 | Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 0 | 946,660,000 |
| 2.0 | 521119 | Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya | 0 | 497,601,000 |
| 2.0 | 521131 | Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 3,518,577,000 |
| 2.0 | 521211 | Allotment Belanja Bahan | 0 | 6,630,254,000 |
| 2.0 | 521213 | Allotment Belanja Honor Output Kegiatan | 0 | 6,660,814,000 |
| 2.0 | 521219 | Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 0 | 13,202,674,000 |
| 2.0 | 521241 | Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 1,462,055,000 |
| 2.0 | 521811 | Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 0 | 2,827,332,000 |
| 2.0 | 522111 | Allotment Belanja Langganan Listrik | 0 | 2,699,115,000 |
| 2.0 | 522112 | Allotment Belanja Langganan Telepon | 0 | 302,782,000 |
| 2.0 | 522113 | Allotment Belanja Langganan Air | 0 | 277,514,000 |
| 2.0 | 522119 | Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 0 | 508,650,000 |
| 2.0 | 522131 | Allotment Belanja Jasa Konsultan | 0 | 859,523,000 |
| 2.0 | 522141 | Allotment Belanja Sewa | 0 | 988,515,000 |
| 2.0 | 522151 | Allotment Belanja Jasa Profesi | 0 | 4,189,875,000 |
| 2.0 | 522191 | Allotment Belanja Jasa Lainnya | 0 | 18,704,791,000 |
| 2.0 | 522192 | Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 1,075,960,000 |
| 2.0 | 523111 | Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0 | 1,830,502,000 |
| 2.0 | 523121 | Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0 | 1,783,707,000 |
| 2.0 | 523123 | Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| 2.0 | 524111 | Allotment Belanja Perjalanan Biasa | 0 | 16,075,765,000 |
| 2.0 | 524113 | Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | 59,015,000 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:09 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.0 | 524114 | Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0 | 1,121,667,000 |
| 2.0 | 524119 | Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0 | 11,621,398,000 |
| 2.0 | 524211 | Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri | 0 | 100,000 |
| 2.0 | 524219 | Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri | 0 | 0 |
| 2.0 | 532111 | Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 4,363,781,000 |
| 2.0 | 532119 | Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 50,000,000 |
| 2.0 | 533121 | Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 0 | 2,072,094,000 |
| 2.0 | 536111 | Allotment Belanja Modal Lainnya | 0 | 195,569,000 |
| 3.0 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 617,977,993 |
| 3.0 | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 536,479,368 |
| 3.0 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 3,928,724 |
| 3.0 | 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 183,536,089 |
| 3.0 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 10,196,615,580 | 0 |
| 3.1 | 511111 | Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS | 0 | 2,053,679 |
| 3.0 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 174,170 | 0 |
| 3.1 | 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS | 0 | 3,009 |
| 3.0 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 678,752,214 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 191,910,106 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 716,290,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1,585,200,000 | 0 |
| 3.1 | 511124 | Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS | 0 | 2,160,000 |
| 3.0 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 120,358,535 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 581,677,440 | 0 |
| 3.1 | 511126 | Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS | 0 | 72,420 |
| 3.0 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 1,481,077,000 | 0 |
| 3.1 | 511129 | Pengembalian Belanja Uang Makan PNS | 0 | 140,000 |
| 3.0 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 321,795,000 | 0 |
| 3.1 | 511151 | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS | 0 | 180,000 |
| 3.0 | 512211 | Belanja Uang Lembur | 5,097,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 15,351,808,649 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 4,173,068,825 | 0 |
| 3.0 | 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 222,867,202 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5,330,700 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 946,060,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 497,592,781 | 0 |
| 3.0 | 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 3,516,599,131 | 0 |
| 3.1 | 521131 | Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Belanja Bahan | 6,610,573,611 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 6,644,488,710 | 0 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022 10:09 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 13,172,765,755 | 0 |
| 3.1 | 521219 | Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 0 | 102,206,197 |
| 3.0 | 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1,239,434,708 | 0 |
| 3.0 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 2,821,144,815 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 2,699,114,093 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 301,564,092 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Belanja Langganan Air | 277,513,210 | 0 |
| 3.0 | 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 489,391,908 | 0 |
| 3.0 | 522131 | Belanja Jasa Konsultan | 859,523,000 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Belanja Sewa | 986,555,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Belanja Jasa Profesi | 4,152,935,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 18,702,726,542 | 0 |
| 3.1 | 522191 | Pengembalian Belanja Jasa Lainnya | 0 | 36,440,359 |
| 3.0 | 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 1,075,958,917 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1,830,458,433 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,783,487,180 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 16,047,867,380 | 0 |
| 3.1 | 524111 | Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa | 0 | 3,710,000 |
| 3.0 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58,955,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1,117,282,000 | 0 |
| 3.1 | 524114 | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0 | 2,520,000 |
| 3.0 | 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 11,584,884,724 | 0 |
| 3.0 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4,362,071,968 | 0 |
| 3.0 | 532119 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 | 48,994,000 | 0 |
| 3.0 | 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 2,072,091,223 | 0 |
| 3.0 | 536111 | Belanja Modal Lainnya | 195,569,000 | 0 |
| JUMLAH | | | 142,490,258,838 | 142,490,258,838 |

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
: 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 07/06/22 10:10
Halaman : 1
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

| URAIAN | 2021 | 2020 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|----------------|----------------|------------------------|-----|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | - |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | - |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | - |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 536,479,368 | 327,316 | 536,152,052 | - |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 536,479,368 | 327,316 | 536,152,052 | - |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah Pendapatan | 536,479,368 | 327,316 | 536,152,052 | - |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Pegawai | 31,241,521,586 | 26,978,490,693 | 4,263,030,893 | - |
| Beban Persediaan | 2,842,140,560 | 3,831,175,179 | (989,034,619) | - |
| Beban Barang dan Jasa | 66,435,416,629 | 72,047,138,538 | (5,611,721,909) | - |
| Beban Pemeliharaan | 3,613,945,613 | 2,437,522,093 | 1,176,423,520 | - |
| Beban Perjalanan Dinas | 28,802,759,104 | 31,920,575,440 | (3,117,816,336) | - |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Bunga | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | - |

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 07/06/22 10:10
Halaman : 2
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

| URAIAN | 2021 | 2020 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----|
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 7,587,692,101 | 6,895,996,675 | 691,695,426 | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | - |
| JUMLAH BEBAN | 140,523,475,593 | 144,110,898,618 | (3,587,423,025) | - |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (139,986,996,225) | (144,110,571,302) | 4,123,575,077 | - |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | - |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | 543,711,493 | (38,580,565,928) | 39,124,277,421 | - |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 617,977,993 | 434,374,597 | 183,603,396 | - |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 74,266,500 | 39,014,940,525 | (38,940,674,025) | - |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | - |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 187,464,813 | 1,308,875,584 | (1,121,410,771) | - |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 187,464,813 | 1,353,918,468 | (1,166,453,655) | - |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 45,042,884 | (45,042,884) | - |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 731,176,306 | (37,271,690,344) | 38,002,866,650 | - |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (139,255,819,919) | (181,382,261,646) | 42,126,441,727 | - |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | - |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | - |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (139,255,819,919) | (181,382,261,646) | 42,126,441,727 | - |

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : Lpe.es1

Tanggal : 07/06/22 10:10

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_es1

| URAIAN | 2021 | 2020 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL | 71,253,603,288 | 513,283,827,735 | (442,030,224,447) | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (139,255,819,919) | (181,382,261,646) | 42,126,441,727 | - |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | (60,876,271) | (414,363,199,823) | 414,302,323,552 | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | 0 | 552,532,500 | (552,532,500) | - |
| SELISIH REVALUASI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | (60,876,271) | (414,915,732,323) | 414,854,856,052 | - |
| LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 145,668,231,591 | 153,715,237,022 | (8,047,005,431) | - |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | 6,351,535,401 | (442,030,224,447) | 448,381,759,848 | - |
| EKUITAS AKHIR | 77,605,138,689 | 71,253,603,288 | 6,351,535,401 | - |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 UNIT ORGANISASI : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Tgl. Cetak 07/06/2022

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|---------------|----------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 117111 | Barang Konsumsi | 42,215,145 | 0 |
| 0.0 | 132111 | Peralatan dan Mesin | 64,756,736,953 | 0 |
| 0.0 | 133111 | Gedung dan Bangunan | 38,929,819,413 | 0 |
| 0.0 | 134113 | Jaringan | 13,687,694,174 | 0 |
| 0.0 | 135121 | Aset Tetap Lainnya | 3,522,153,447 | 0 |
| 0.0 | 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 46,773,565,882 |
| 0.0 | 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 3,547,460,317 |
| 0.0 | 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | 0 | 582,147,234 |
| 0.0 | 162151 | Software | 2,067,815,000 | 0 |
| 0.0 | 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 722,478,500 | 0 |
| 0.0 | 166113 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 4,629,210,905 | 0 |
| 0.0 | 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0 | 708,905,785 |
| 0.0 | 169315 | Akumulasi Amortisasi Software | 0 | 915,713,126 |
| 0.0 | 169318 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan | 0 | 4,530,188,905 |
| 0.0 | 212111 | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | 0 | 46,539,000 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 71,253,603,288 |
| JUMLAH | | | 128,358,123,537 | 128,358,123,537 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 07/06/22 10:10
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

| AKUN | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | | | | | | | |
| 5111 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | | | | | | | |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 9,679,685,000 | 10,455,682,000 | 10,196,615,580 | 2,053,679 | 10,194,561,901 | 97.5 | 261,120,099 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 183,000 | 201,000 | 174,170 | 3,009 | 171,161 | 85.15 | 29,839 |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 682,900,000 | 689,376,000 | 678,752,214 | 0 | 678,752,214 | 98.46 | 10,623,786 |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 194,584,000 | 200,689,000 | 191,910,108 | 0 | 191,910,108 | 95.63 | 8,778,894 |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 779,306,000 | 737,695,000 | 716,290,000 | 0 | 716,290,000 | 97.1 | 21,405,000 |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1,736,425,000 | 1,631,045,000 | 1,585,200,000 | 2,160,000 | 1,583,040,000 | 97.06 | 48,005,000 |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 162,578,000 | 130,349,000 | 120,358,535 | 0 | 120,358,535 | 92.34 | 9,990,465 |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 465,776,000 | 593,335,000 | 581,677,440 | 72,420 | 581,605,020 | 98.02 | 11,729,980 |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 1,420,688,000 | 1,643,181,000 | 1,481,077,000 | 140,000 | 1,480,937,000 | 90.13 | 162,244,000 |
| 511147 | Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 196,932,000 | 334,875,000 | 321,795,000 | 180,000 | 321,615,000 | 96.04 | 13,260,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 | 15,359,057,000 | 16,416,428,000 | 15,873,850,045 | 4,609,108 | 15,869,240,937 | 96.69 | 547,187,063 |
| 5122 | Belanja Lembur | | | | | | | |
| 512211 | Belanja Uang Lembur | 751,578,000 | 84,910,000 | 5,097,000 | 0 | 5,097,000 | 6 | 79,813,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 | 751,578,000 | 84,910,000 | 5,097,000 | 0 | 5,097,000 | 6 | 79,813,000 |
| 5124 | Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit | | | | | | | |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 14,705,934,000 | 15,561,931,000 | 15,351,808,649 | 0 | 15,351,808,649 | 98.65 | 210,122,351 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 | 14,705,934,000 | 15,561,931,000 | 15,351,808,649 | 0 | 15,351,808,649 | 98.65 | 210,122,351 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 | 30,816,569,000 | 32,063,269,000 | 31,230,755,694 | 4,609,108 | 31,226,146,586 | 97.4 | 837,122,414 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5211 | Belanja Barang Operasional | | | | | | | |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 4,088,229,000 | 4,179,274,000 | 4,173,068,825 | 0 | 4,173,068,825 | 99.85 | 6,205,175 |
| 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 161,011,000 | 222,868,000 | 222,867,202 | 0 | 222,867,202 | 100 | 798 |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 4,500,000 | 7,150,000 | 5,330,700 | 0 | 5,330,700 | 74.56 | 1,819,300 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 930,000,000 | 946,660,000 | 946,060,000 | 0 | 946,060,000 | 99.94 | 600,000 |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 510,784,000 | 497,601,000 | 497,592,781 | 0 | 497,592,781 | 100 | 8,219 |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi | 505,510,000 | 3,518,577,000 | 3,516,599,131 | 0 | 3,516,599,131 | 99.94 | 1,977,869 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 | 6,200,034,000 | 9,372,130,000 | 9,361,518,639 | 0 | 9,361,518,639 | 99.89 | 10,611,361 |
| 5212 | Belanja Barang Non Operasional | | | | | | | |
| 521211 | Belanja Bahan | 11,852,225,000 | 6,630,254,000 | 6,610,573,611 | 0 | 6,610,573,611 | 99.7 | 19,680,389 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 7,659,399,000 | 6,660,814,000 | 6,644,488,710 | 0 | 6,644,488,710 | 99.75 | 16,325,290 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 7,064,914,000 | 13,202,674,000 | 13,172,765,755 | 102,206,197 | 13,070,559,558 | 99 | 132,114,442 |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi | 201,600,000 | 1,482,055,000 | 1,239,434,708 | 0 | 1,239,434,708 | 84.77 | 222,620,292 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 | 26,778,138,000 | 27,955,797,000 | 27,667,262,784 | 102,206,197 | 27,565,056,587 | 98.97 | 390,740,413 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 07/06/22 10:10
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

| AKUN | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 5218 | Belanja Barang Persediaan | | | | | | | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 4,539,937,000 | 2,827,332,000 | 2,821,144,815 | 0 | 2,821,144,815 | 99.78 | 6,187,185 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 | 4,539,937,000 | 2,827,332,000 | 2,821,144,815 | 0 | 2,821,144,815 | 99.78 | 6,187,185 |
| 5221 | Belanja Jasa | | | | | | | |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 2,346,000,000 | 2,699,115,000 | 2,699,114,093 | 0 | 2,699,114,093 | 100 | 907 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 72,000,000 | 302,782,000 | 301,564,092 | 0 | 301,564,092 | 99.6 | 1,217,908 |
| 522113 | Belanja Langganan Air | 84,000,000 | 277,514,000 | 277,513,210 | 0 | 277,513,210 | 100 | 790 |
| 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 221,325,000 | 508,650,000 | 489,391,908 | 0 | 489,391,908 | 96.21 | 19,258,092 |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultan | 4,077,138,000 | 859,523,000 | 859,523,000 | 0 | 859,523,000 | 100 | 0 |
| 522141 | Belanja Sewa | 1,463,472,000 | 988,515,000 | 986,555,000 | 0 | 986,555,000 | 99.8 | 1,960,000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 15,388,950,000 | 4,189,875,000 | 4,152,935,000 | 0 | 4,152,935,000 | 99.12 | 36,940,000 |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 20,813,764,000 | 18,704,791,000 | 18,702,726,542 | 36,440,359 | 18,666,286,183 | 99.79 | 38,504,817 |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 819,600,000 | 1,075,960,000 | 1,075,958,917 | 0 | 1,075,958,917 | 100 | 1,083 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 | 45,286,249,000 | 29,606,725,000 | 29,545,281,762 | 36,440,359 | 29,508,841,403 | 99.79 | 97,883,597 |
| 5231 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | | |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2,779,187,000 | 1,830,502,000 | 1,830,458,433 | 0 | 1,830,458,433 | 100 | 43,567 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,240,488,000 | 1,783,707,000 | 1,783,487,180 | 0 | 1,783,487,180 | 99.99 | 219,820 |
| 523123 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan | 211,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 | 4,230,785,000 | 3,614,209,000 | 3,613,945,613 | 0 | 3,613,945,613 | 99.99 | 263,387 |
| 5241 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 51,258,142,000 | 16,075,765,000 | 16,047,867,380 | 3,710,000 | 16,044,157,380 | 99.8 | 31,607,620 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1,367,970,000 | 59,015,000 | 58,955,000 | 0 | 58,955,000 | 99.9 | 60,000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 4,288,229,000 | 1,121,667,000 | 1,117,282,000 | 2,520,000 | 1,114,762,000 | 99.38 | 6,905,000 |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 7,229,775,000 | 11,621,398,000 | 11,584,884,724 | 0 | 11,584,884,724 | 99.69 | 36,513,276 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 | 64,144,116,000 | 28,877,845,000 | 28,808,989,104 | 6,230,000 | 28,802,759,104 | 99.76 | 75,085,896 |
| 5242 | Belanja Perjalanan Luar Negeri | | | | | | | |
| 524211 | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri | 1,999,736,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 524219 | Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri | 2,268,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 | 4,268,244,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 155,447,503,000 | 102,254,138,000 | 101,818,142,717 | 144,876,556 | 101,673,266,161 | 99.57 | 580871839 |
| 53 | BELANJA MODAL | | | | | | | |
| 5321 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6,110,585,000 | 4,363,781,000 | 4,362,071,968 | 0 | 4,362,071,968 | 99.96 | 1,709,032 |
| 532119 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan | 0 | 50,000,000 | 48,994,000 | 0 | 48,994,000 | 97.99 | 1,006,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 | 6,110,585,000 | 4,413,781,000 | 4,411,065,968 | 0 | 4,411,065,968 | 99.94 | 2,715,032 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 07/06/22 10:10
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

| AKUN | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 5331 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | | | |
| 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 3,570,000,000 | 2,072,094,000 | 2,072,091,223 | 0 | 2,072,091,223 | 100 | 2,777 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 | 3,570,000,000 | 2,072,094,000 | 2,072,091,223 | 0 | 2,072,091,223 | 100 | 2,777 |
| 5361 | Belanja Modal Lainnya | | | | | | | |
| 536111 | Belanja Modal Lainnya | 2,048,514,000 | 195,569,000 | 195,569,000 | 0 | 195,569,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 | 2,048,514,000 | 195,569,000 | 195,569,000 | 0 | 195,569,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 | 11,729,099,000 | 6,681,444,000 | 6,678,726,191 | 0 | 6,678,726,191 | 99.96 | 2717809 |
| | JUMLAH BELANJA | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,624,602 | 149,485,664 | 139,578,138,938 | 99.1 | 1,420,712,062 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 07/06/22 10:11
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

| KODE | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 11 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 022110100K | Kode UAPPAW Tidak Ada | | | | | | | |
| 288752 | SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | 58,184,697,000 | 45,843,217,000 | 45,839,267,467 | 7,676,201 | 45,831,591,266 | 99.97 | 11,625,734 |
| 288944 | PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN | 37,597,108,000 | 26,190,807,000 | 25,807,617,605 | 2,161,577 | 25,805,456,028 | 98.53 | 385,350,972 |
| 288951 | PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA | 31,174,492,000 | 21,024,386,000 | 20,809,852,724 | 103,206,576 | 20,706,646,148 | 98.49 | 317,739,852 |
| 414267 | PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN | 48,296,699,000 | 30,369,097,000 | 29,722,289,940 | 951 | 29,722,288,989 | 97.87 | 646,808,011 |
| 634171 | PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA | 24,740,175,000 | 17,571,344,000 | 17,548,596,866 | 36,440,359 | 17,512,156,507 | 99.66 | 59,187,493 |
| | JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,824,602 | 149,485,664 | 139,578,338,938 | 99.1 | 1,420,712,062 |
| | JUMLAH BELANJA 11 | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,824,602 | 149,485,664 | 139,578,338,938 | 99.1 | 1,420,712,062 |
| | JUMLAH BELANJA | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,824,602 | 149,485,664 | 139,578,338,938 | 99.1 | 1,420,712,062 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 07/06/22 10:11
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 --

| KODE | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| | | | | BELANJA | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 0199 | INSTANSI PUSAT | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 30,816,569,000 | 32,063,269,000 | 31,230,755,694 | 4,609,108 | 31,226,146,586 | 97.39 | 837,122,414 |
| 52 | BELANJA BARANG | 155,447,503,000 | 102,254,138,000 | 101,818,142,717 | 144,876,556 | 101,673,266,161 | 99.43 | 580,871,839 |
| 53 | BELANJA MODAL | 11,729,099,000 | 6,681,444,000 | 6,678,726,191 | 0 | 6,678,726,191 | 99.96 | 2,717,809 |
| | JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199 | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,624,602 | 149,485,664 | 139,578,138,938 | 99.1 | 1,420,712,062 |
| | JUMLAH BELANJA | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,624,602 | 149,485,664 | 139,578,138,938 | 99.1 | 1,420,712,062 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 UNIT ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 07/06/22 10:11
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_prog_glat_es1 --

| KODE | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | BELANJA | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 01 | RUPIAH MURNI | | | | | | | |
| KB | Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | | | | | | | |
| 1970 | Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi | 60,910,979,000 | 41,113,811,000 | 41,052,714,311 | 139,506,556 | 40,913,207,755 | 99.51 | 200,603,245 |
| 4662 | Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi | 51,182,418,000 | 26,009,734,000 | 25,662,285,287 | 0 | 25,662,285,287 | 98.66 | 347,448,713 |
| | JUMLAH BELANJA PROGRAM KB | 112,093,397,000 | 67,123,545,000 | 66,714,999,598 | 139,506,556 | 66,575,493,042 | 99.085 | 548,051,958 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | | | | | | | |
| 4652 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan | 9,626,865,000 | 4,958,656,000 | 4,958,433,232 | 2,520,000 | 4,955,913,232 | 99.94 | 2,742,768 |
| 4653 | Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan | 68,648,262,000 | 66,109,386,000 | 65,246,989,400 | 7,459,108 | 65,239,530,292 | 96.68 | 669,855,708 |
| 4654 | Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan | 2,485,530,000 | 549,096,000 | 549,066,421 | 0 | 549,066,421 | 99.99 | 29,579 |
| 4655 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan | 5,139,117,000 | 2,258,168,000 | 2,258,135,951 | 0 | 2,258,135,951 | 100 | 32,049 |
| | JUMLAH BELANJA PROGRAM WA | 85,899,774,000 | 73,875,306,000 | 73,012,625,004 | 9,979,108 | 73,002,645,896 | 99.652 | 872,660,104 |
| | JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,624,602 | 149,485,664 | 139,578,138,938 | 99.463 | 1,420,712,062 |
| | JUMLAH | 197,993,171,000 | 140,998,851,000 | 139,727,624,602 | 149,485,664 | 139,578,138,938 | 99.46 | 1,420,712,062 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 07/06/22 10:12
Halaman : 1
Prg ID : lap_fra_bel_akun_covid_es1 --

| AKUN | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5211 | Belanja Barang Operasional | | | | | | | |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 505,510,000 | 3,518,577,000 | 3,516,599,131 | 0 | 3,516,599,131 | 99.94 | 1,977,869 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 | 505,510,000 | 3,518,577,000 | 3,516,599,131 | 0 | 3,516,599,131 | 99.94 | 1,977,869 |
| 5212 | Belanja Barang Non Operasional | | | | | | | |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 201,600,000 | 1,462,055,000 | 1,239,434,708 | 0 | 1,239,434,708 | 84.77 | 222,620,292 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 | 201,600,000 | 1,462,055,000 | 1,239,434,708 | 0 | 1,239,434,708 | 84.77 | 222,620,292 |
| 5221 | Belanja Jasa | | | | | | | |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 819,600,000 | 1,075,960,000 | 1,075,958,917 | 0 | 1,075,958,917 | 100 | 1,083 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 | 819,600,000 | 1,075,960,000 | 1,075,958,917 | 0 | 1,075,958,917 | 100 | 1,083 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 1,526,710,000 | 6,058,592,000 | 5,831,992,756 | 0 | 5,831,992,756 | 96.29 | 224,599,244 |
| 53 | BELANJA MODAL | | | | | | | |
| 5321 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | | |
| 532119 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 50,000,000 | 48,994,000 | 0 | 48,994,000 | 97.99 | 1,006,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 | 0 | 50,000,000 | 48,994,000 | 0 | 48,994,000 | 97.99 | 1,006,000 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 | 0 | 50,000,000 | 48,994,000 | 0 | 48,994,000 | 97.99 | 1,006,000 |
| | JUMLAH BELANJA | 1,526,710,000 | 6,108,592,000 | 5,880,986,756 | 0 | 5,880,986,756 | 96.31 | 225,605,244 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/06/22 10:12
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_pen_akun_es1 --

| KODE | URAIAN | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN | | | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | PENDAPATAN | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=6/3 |
| 42 | PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | | | | |
| 4251 | Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha | | | | | |
| 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 617,977,993 | 0 | 617,977,993 | 0 |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 536,479,368 | 0 | 536,479,368 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 | 0 | 1,154,457,361 | 0 | 1,154,457,361 | |
| 4259 | Pendapatan Lain-Lain | | | | | |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 3,928,724 | 0 | 3,928,724 | 0 |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 183,536,089 | 0 | 183,536,089 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259 | 0 | 187,464,813 | 0 | 187,464,813 | |
| | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 | 0 | 1,341,922,174 | 0 | 1,341,922,174 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 1,341,922,174 | 0 | 1,341,922,174 | |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 07/06/22 10:12
Halaman : 1
Prg ID : lap_tra_pen_org_es1 --rekon17

| KODE | URAIAN | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN | | | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | PENDAPATAN | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=6/3 |
| 0199 | INSTANSI PUSAT | | | | | |
| 288752 | SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | 0 | 900,609,417 | 0 | 900,609,417 | 0 |
| 288944 | PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN | 0 | 132,608,368 | 0 | 132,608,368 | 0 |
| 288951 | PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA | 0 | 95,168,168 | 0 | 95,168,168 | 0 |
| 414267 | PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN | 0 | 182,896,604 | 0 | 182,896,604 | 0 |
| 634171 | PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA | 0 | 30,639,617 | 0 | 30,639,617 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT | 0 | 1,341,922,174 | 0 | 1,341,922,174 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 1,341,922,174 | 0 | 1,341,922,174 | 0 |

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN (BA 022.11) TAHUN 2021
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2021 (AUDITED)**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **April** Tahun **2022**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan rekonsiliasi untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam laporan keuangan **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (BA 022.11)** Tahun 2021, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (BA 022.11)** Tahun 2021 dan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021 (*Audited*).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi Laporan Keuangan **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan** dan Laporan Keuangan **Kementerian Perhubungan**. Penyesuaian angka-angka pada Laporan Keuangan **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan** dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi antara Biro Keuangan dan Bagian Keuangan **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**. Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari UAPPA E1 **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan** dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati Bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan** menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (BA 022.11)** Tahun 2021 beserta rincian secara lengkap sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan **paling lambat tanggal 9 Mei 2022**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Bagian Akuntansi,



Joko Murdyono

NIP. 19711007 199703 1 004

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan,



Fardian Isibhi

NIP. 19721204 200112 1 002

Mengetahui
Tim Pemeriksa BPK

Retno Rushanty W.

NIP. 19760808 200501 2 005

1. Laporan Realisasi Anggaran

UAPPA-E1 : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

(dalam rupiah)

| Kode Akun | URAIAN | SALDO 31 Desember 2020 (AUDITED) | SALDO 31 DESEMBER 2021 (UNAUDITED) | | | KOREKSI BRUTO | | KOREKSI PENGEMBALIAN | | SALDO 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) | | | SALDO EREKON & LK | | | SELISIH | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | BRUTO | PENGEMBALIAN | NETTO | DEBIT | KREDIT | DEBIT | KREDIT | BRUTO | PENGEMBALIAN | NETTO | BRUTO | PENGEMBALIAN | NETTO | BRUTO | PENGEMBALIAN | NETTO |
| | PENDAPATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 1.729.738.044 | 1.341.922.174 | | 1.341.922.174 | - | - | - | - | 1.341.922.174 | | 1.341.922.174 | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.729.738.044 | 1.341.922.174 | | 1.341.922.174 | | | | | 1.341.922.174 | | 1.341.922.174 | | | | | | |
| | BELANJA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Belanja Pegawai | 26.931.951.693 | 31.230.755.694 | 4.600.108 | 31.226.146.586 | - | - | - | - | 31.230.755.694 | 4.600.108 | 31.226.146.586 | | | | | | |
| 52 | Belanja Barang | 110.330.817.072 | 101.818.142.717 | 144.876.556 | 101.673.266.161 | - | - | - | - | 101.818.142.717 | 144.876.556 | 101.673.266.161 | | | | | | |
| 53 | Belanja Modal | 18.182.206.301 | 6.678.726.191 | | 6.678.726.191 | - | - | - | - | 6.678.726.191 | | 6.678.726.191 | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 155.444.975.066 | 139.727.624.602 | 149.485.664 | 139.578.138.938 | | | | | 139.727.624.602 | 149.485.664 | 139.578.138.938 | | | | | | |

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA.022)
Kepala Bagian Akuntansi


JOKO MURDYONO
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui
Tim Pemeriksa BPK

RETNO RISHANTY W.
NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Litbang Perhubungan (BA.022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan


FARDIAN ISIBHI
NIP. 19721204 200112 1 002

| Kode Akun | URAIAN | SALDO 31 Desember 2020 (Audited) | SALDO 31 Desember 2021 (Unaudited) | KOREKSI AUDITED | | | | JURNAL UPDATE APLIKASI (PERIODE 4-8 APRIL) | | SALDO 31 Desember 2021 (Audited) | SALDO EREKON 2021 AUDITED | SELISIH |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|---|--------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | JURNAL PENYESUAIAN | | JURNAL REKLASIFIKASI | | DEBIT | KREDIT | | | |
| | | | | DEBIT | KREDIT | DEBIT | KREDIT | | | | | |
| 2121 | Utang kepada Pihak Ketiga | 46.539.000 | 61.914.000 | - | - | - | - | - | - | 61.914.000 | 61.914.000 | - |
| 2161 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2191 | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2199 | Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2182 | Hibah yang Belum Disahkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2195 | Utang Muka dari KPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2192 | Pendapatan Diterima Dimuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 46.539.000 | 61.914.000 | - | - | - | - | - | - | 61.914.000 | 61.914.000 | - |
| | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | | | | | | |
| 2219 | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2215 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 46.539.000 | 61.914.000 | - | - | - | - | - | - | 61.914.000 | 61.914.000 | - |
| 3911 | EKUITAS | 71.253.603.288 | 73.659.004.029 | 51.922.890 | 3.998.062.550 | - | - | (5.000) | - | 77.605.138.689 | 77.605.138.689 | 77.605.138.689 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 71.300.142.288 | 73.720.918.029 | 51.922.890 | 3.998.062.550 | - | - | (5.000) | - | 77.667.052.689 | 61.914.000 | 77.605.138.689 |
| | | TRUE | TRUE | | | | | | | TRUE | | |

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)

Kepala Bagian Akuntansi


JOKO MURDYONO
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui
Tim Pemeriksa BPK


RETNO RUSHANTY W.
NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Litbang Perhubungan (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan


FARDIAN ISIBHI
NIP. 19721204 200112 1 002

3. LAPORAN OPERASIONAL

UAPPA-E1 : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

| URAIAN | SALDO 31 Desember 2020 (Audited) | SALDO 31 Desember 2021 (Unaudited) | KOREKSI AUDITED | | | | JURNAL UPDATE APLIKASI (PERIODE 4-8 APRIL) | | SALDO 31 Desember 2021 (AUDITED) | SALDO EREKON 2021 AUDITED | SELISIH |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------|---|----------|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | JURNAL PENYESUAIAN | | JURNAL REKLASIFIKASI | | DEBIT | KREDIT | | | |
| | | | DEBIT | KREDIT | DEBIT | KREDIT | | | | | |
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | | | | | | | |
| PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 327.316 | 536.479.368 | - | - | - | - | - | - | 536.479.368 | 536.479.368 | |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 327.316 | 536.479.368 | - | - | - | - | - | - | 536.479.368 | 536.479.368 | |
| BEBAN | | | | | | | | | | | |
| Beban Pegawai | 26.978.490.693 | 31.241.521.586 | - | - | - | - | - | - | 31.241.521.586 | 31.241.521.586 | |
| Beban Persediaan | 3.831.175.179 | 2.842.136.560 | - | - | - | - | 5.000 | - | 2.842.140.560 | 2.842.140.560 | |
| Beban Barang dan Jasa | 72.047.138.538 | 66.435.416.629 | - | - | - | - | - | - | 66.435.416.629 | 66.435.416.629 | |
| Beban Pemeliharaan | 2.437.522.093 | 3.613.945.613 | - | - | - | - | - | - | 3.613.945.613 | 3.613.945.613 | |
| Beban Penyaliran Dinas | 31.920.575.440 | 28.802.759.104 | - | - | - | - | - | - | 28.802.759.104 | 28.802.759.104 | |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Subsidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Bantuan Sosial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Lain-lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 6.895.996.675 | 7.535.769.211 | (51.922.890) | - | - | - | - | - | 7.587.692.101 | 7.587.692.101 | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Beban Operasional | 144.110.888.618 | 140.471.547.703 | (51.922.890) | - | - | - | 5.000 | - | 140.523.475.593 | 140.523.475.593 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (144.110.571.302) | (139.935.068.335) | 51.922.890 | - | - | - | (5.000) | - | (139.986.996.225) | (139.986.996.225) | |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 434.374.597 | 617.977.993 | - | - | - | - | - | - | 617.977.993 | 617.977.993 | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 39.014.940.525 | 74.266.500 | - | - | - | - | - | - | 74.266.500 | 74.266.500 | |
| Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Non Aset Lancar | (38.580.565.928) | 543.711.493 | - | - | - | - | - | - | 543.711.493 | 543.711.493 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 1.353.918.468 | 187.464.813 | - | - | - | - | - | - | 187.464.813 | 187.464.813 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 45.042.884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 1.308.875.584 | 187.464.813 | - | - | - | - | - | - | 187.464.813 | 187.464.813 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | (37.271.690.344) | 731.176.308 | - | - | - | - | - | - | 731.176.308 | 731.176.308 | |
| POS LUAR BIASA | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beban Luar Biasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | (181.382.261.648) | (139.203.892.029) | 51.922.890 | - | - | - | (5.000) | - | (139.255.819.919) | (139.255.819.919) | |

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Bagian Akuntansi


JOKO MURDYONO
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui
Tim Pemeriksa BPK


RETNO RISHANTY W.
NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Litbang Perhubungan (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan


FARDIAN ISIBHI
NIP. 19721204 200112 1 002

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UAPPA-E1 : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

| | URAIAN | SALDO 31 Desember 2020 (Audited) | SALDO 31 Desember 2021 (Unaudited) | KOREKSI AUDITED - NON REVAL | | | | JURNAL UPDATE APLIKASI (PERIODE 4-8 APRIL) | | SALDO 31 Desember 2021 (AUDITED) | SALDO EREKON 2021 AUDITED | SELISIH |
|--------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------|---|--------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | JURNAL PENYESUAIAN | | JURNAL REKLASIFIKASI | | DEBIT | KREDIT | | | |
| | | | | DEBIT | KREDIT | DEBIT | KREDIT | | | | | |
| 391111 | EKUITAS AWAL | 513.283.827.735 | 71.253.603.288 | - | - | - | - | - | - | 71.253.603.288 | 71.253.603.288 | - |
| | SURPLUS/DEFISIT LO | (181.382.261.646) | (139.203.892.029) | 51.922.890 | - | - | - | (5.000) | - | (139.255.819.919) | (139.255.819.919) | - |
| | KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | (414.363.199.823) | (60.876.271) | - | - | - | - | - | - | (60.876.271) | (60.876.271) | - |
| 311315 | Penyesuaian Nilai Aset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391113 | Koreksi Nilai Persediaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391114 | Revaluasi Aset Tetap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi | (414.915.732.323) | (60.876.271) | - | - | - | - | - | - | (60.876.271) | (60.876.271) | - |
| 391151 | Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | 552.532.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391119 | Koreksi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 153.715.237.022 | 141.670.169.041 | - | 3.998.062.550 | - | - | - | - | 145.668.231.591 | 141.670.169.041 | 3.998.062.550 |
| 313111 | Ditaghkan ke Entitas Lain | 155.444.975.066 | 139.578.138.938 | - | - | - | - | - | - | 139.578.138.938 | 139.578.138.938 | - |
| 313121 | Diterima dari Entitas Lain | (1.729.738.044) | (1.341.922.174) | - | - | - | - | - | - | (1.341.922.174) | (1.341.922.174) | - |
| 313211 | Transfer Keluar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 313221 | Transfer Masuk | - | 3.433.952.277 | - | 3.998.062.550 | - | - | - | - | 7.432.014.827 | 3.433.952.277 | 3.998.062.550 |
| 391131 | Pengesahan Hibah Langsung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391133 | Pengesahan Hibah Langsung TAYL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391132 | Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 391141 | Setoran Surplus BLU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kenaikan/Penurunan Ekuitas | (442.030.224.447) | 2.405.400.741 | 51.922.890 | 3.998.062.550 | - | - | (5.000) | - | 6.351.535.401 | 2.353.472.851 | 3.998.062.550 |
| | EKUITAS AKHIR | 71.253.603.288 | 73.659.004.029 | 51.922.890 | 3.998.062.550 | - | - | (5.000) | - | 77.605.138.689 | 73.607.076.139 | 3.998.062.550 |

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Perhubungan (BA 022)
Kepala Bagian Akuntansi


JOKO MURDYONO
NIP. 19711007 199703 1 004

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Badan Litbang Perhubungan (BA 022.11)
Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Mengetahui
Tim Pemeriksa BPK

RETNO RUSHANTY W.
NIP. 19760908 200501 2 005


PARDIAN ISIBHI
NIP. 19721204 200112 1 002

JURNAL KOREKSI AKRUAL
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan karena update aplikasi

UJIPA-01 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

| NOMOR JURNAL | KODE AKUN | AKUN 4 DIGIT | AKUN 3 DIGIT | AKUN 2 DIGIT | NAMA AKUN | JURNAL UPDATES APLIKASI (PERIODE 4-8 APRIL) | | JURNAL PERSELESAIAN | | JURNAL REKLASIFIKASI | | PENJELASAN JURNAL (UNTUK DISI DALAM KETERANGAN APLIKASI) | KODE SATKER | NAMA SATKER | ESKELON I | AUDITOR | KETERANGAN | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|---|----------|---------------------|----|----------------------|----|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | DR | CR | DR | CR | DR | CR | | | | | | JENIS JURNAL* (MANUAL / SISTEM) | PERSEDIaan / SIMAK / SAIBA |
| 1 | 591111 | 9951 | 993 | 59 | Beban Persediaan Konsumsi | 5.000,00 | | | | | | Koreksi Timbul Karena Adanya Update Aplikasi Persediaan 21.1.0 | 288951 | PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA | BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | BU WORD | SISTEM | PERSEDIaan |
| | 117111 | 1173 | 117 | 11 | Barang Konsumsi | | 5.000,00 | | | | | Koreksi Timbul Karena Adanya Update Aplikasi Persediaan 21.1.0 | 288951 | PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA | BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | BU WORD | SISTEM | PERSEDIaan |
| 2 | 113111 | 1331 | 133 | 13 | Gedung dan Bangunan | | | 3.998.062.550,00 | | | | Terdapat Transfer Masuk ATR dari KNKT dan Pusbang Laut BPSDM | 288752 | SEKRETARIAT BADAN LITBANG PHB | BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | BU WORD | MANUAL | SIMAK DAN SAIBA |
| | 113211 | 1112 | 111 | 11 | Transfer Masuk | | | 3.998.062.550,00 | | | | Terdapat Transfer Masuk ATR dari KNKT dan Pusbang Laut BPSDM | 288752 | SEKRETARIAT BADAN LITBANG PHB | BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | BU WORD | MANUAL | SIMAK DAN SAIBA |
| 3 | 591211 | 5912 | 591 | 59 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | 51.922.890,00 | | | | Terdapat Transfer Masuk ATR dari KNKT dan Pusbang Laut BPSDM | 288752 | SEKRETARIAT BADAN LITBANG PHB | BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | BU WORD | MANUAL | SIMAK DAN SAIBA |
| | 117211 | 1372 | 137 | 13 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | 51.922.890,00 | | | | Terdapat Transfer Masuk ATR dari KNKT dan Pusbang Laut BPSDM | 288752 | SEKRETARIAT BADAN LITBANG PHB | BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | BU WORD | MANUAL | SIMAK DAN SAIBA |

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
 Kementerian Perhubungan (BA 022)
 Kepala Bagian Akuntansi



JOKO MURDYONO
 NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui
 Tim Pengantar BPK



RETNO RISHANTY W.
 NIP. 19760808 200501 2 005

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
 Badan Litbang Perhubungan (BA 022.11)
 Kepala Bagian Keuangan dan Perengkapan



FANDIAN ISIHHI
 NIP. 19721204 200112 1 002

Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset

Nomor :

Tanggal : _____

DAFTAR BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS - TUGAS OPERASIONAL

| NO | NAMA BARANG/URAIAN | KODE | NUP | TAHUN PEROLEHAN | NILAI BUKU | UNIT YANG MENERIMA | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------|------------|-----|-----------------|---------------|---|---------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 4010101001 | 2 | 1972 | 1.529.291.204 | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Gedung Perpustakaan |
| 2 | Elevator / Lift | 3010302001 | 1 | 2019 | 2,254,901,000 | | |
| JUMLAH | | | | | 3.784.192.204 | | |

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003



PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN


FANDUWANTO, Ph.D. M. ENG. SC.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001



BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
YANG AKAN DISERAHTERIMAKAN KEPADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS – TUGAS OPERASIONAL

NOMOR PL.301 / 6 / 18 / 03PL / 2021

1. Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh dua* Bulan *Oktober* Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1372 Tahun 2021 Tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. Kuasa Pengguna Barang (KPB) Unit Kerja yang akan mengoperasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Elevator / Lift sesuai daftar terlampir untuk dipergunakan dalam mendukung tugas dan fungsi.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional, selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan aset sebagaimana terlampir.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mencatat hasil pekerjaan tersebut kedalam daftar inventarisasi barang miliknya melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan atas hasil pekerjaan tersebut.

Pasal 4

Daftar Lampiran Hasil Pekerjaan lengkap ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset ini.

Berita Acara Serah Terima Aset ini akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,



Signature and official stamp of the first party (PIHAK PERTAMA).

PIHAK KEDUA,



Signature and official stamp of the second party (PIHAK KEDUA).

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
YANG AKAN DISERAHTERIMAKAN KEPADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS – TUGAS OPERASIONAL

NOMOR PL.301/G/18/DJPL/2021

1. Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal ~~Dua Puluh Dua~~ Bulan ~~Oktober~~ Tahun ~~Dua Ribu Dua Puluh Satu~~ selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1372 Tahun 2021 Tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. Kuasa Pengguna Barang (KPB) Unit Kerja yang akan mengoperasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Elevator / Lift sesuai daftar terlampir untuk dipergunakan dalam mendukung tugas dan fungsi.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional, selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan aset sebagaimana terlampir.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mencatat hasil pekerjaan tersebut kedalam daftar inventarisasi barang miliknya melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan atas hasil pekerjaan tersebut.

Pasal 4

Daftar Lampiran Hasil Pekerjaan lengkap ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset ini.

Berita Acara Serah Terima Aset ini akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS - TUGAS OPERASIONAL

| NO | NAMA BARANG/URAIAN | KODE | NUP | TAHUN PEROLEHAN | NILAI BUKU | UNIT YANG MENERIMA | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------|------------|-----|-----------------|---------------|---|---------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 4010101001 | 2 | 1972 | 1.529.291.204 | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Gedung Perpustakaan |
| 2 | Elevator / Lift | 3010302001 | 1 | 2019 | 2.254.901.000 | | |
| JUMLAH | | | | | 3.784.192.204 | | |

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN



**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
DARI SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN KEPADA
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

Nomor : DA-48 / BPSDMP-2021
Nomor :

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Jakarta Pusat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **M. YUGIHARTIMAN** : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 2329 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PANDU YUNianto** : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Barang yang diangkat berdasarkan Nomor : SK. 2330 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara dan ADK (Arsip Data Komputer) Transfer Keluar-Transfer Masuk sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** berupa Aset Tetap dalam Renovasi (Renovasi Gedung Lantai 2 Sekretariat BPSDM Perhubungan) dengan nilai perolehan Rp76.590.635,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA selanjutnya akan menghapus dari Daftar Inventaris Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai transfer keluar dan **PIHAK KEDUA** akan membukukan Barang Milik Negara tersebut sebagai transfer masuk dan melakukan kapitalisasi nilai Gedung dan Bangunan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 3

PIHAK KEDUA selanjutnya berkewajiban untuk mengusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan melakukan pemeliharaan Barang Milik Negara dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN



M. YUGIHARTIMAN

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610808 198703 1 002

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN



BANDU YUNianto

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Milik Negara

Nomor : BA. 48 / BPSDMP-2021

Tanggal : 28 Juni 2021

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN
DARI SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEPADA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

| No | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Volume | Tanggal Perolehan | Jenis ATR | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan |
|---------------|---------------------------------|----------------|-----|--------|-------------------|--|----------------------|--------------|
| - | Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) | 6.07.03.01.001 | 5 | 1 Unit | 12 Desember 2020 | Renovasi Gedung Lantai 2 Sekretariat BPSDM Perhubungan | 76.590.635 | Kondisi Baik |
| JUMLAH | | | | | | | 76.590.635 | |

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN

M. YUGIHARTIMAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610808 198703 1 002

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

PANDU YUNianto
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

REALISASI BELANJA PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC-PEN)
PER 31 DESEMBER 2021

| No | Cluster/Sub Cluster | Kode Satker | Nama Satker | Pagu DIPA | Realisasi Anggaran | | | | | % Realisasi Terhadap DIPA | Target Output | Realisasi Output | | SP2D | | Keterangan | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------|-----------------|--------------|---|-------|--|--|--|-----------------|------------|--|
| | | | | | Akum | Rupiah | Akum | Rupiah | Total Akum Reguler | | | Volume | Satuan | Nomor SP2D | Tanggal SP2D | | | | | | | | |
| 1 | | 285752 | Sekretariat Badan Litbang Perhubungan | 1.738.629.000 | 521131 | 45.540.000 | 0 | 0 | 45.540.000 | 2,62% | | | | 211331303000205 | 25/01/2021 | Pembelian Vitamin dan Paket Penambah Daya Tahan Tubuh | | | | | | | |
| | | | | | | 89.105.500 | | | 89.105.500 | 5,12% | | | | 211331303000653 | 10/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 15.621.760 | | | 15.621.760 | 0,90% | | | | 211331303001177 | 01/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 78.633.500 | | | 78.633.500 | 4,52% | | | | 211331303001675 | 12/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 890.000 | | | 890.000 | 0,05% | | | | 211331303002870 | 15/04/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 36.839.000 | | | 36.839.000 | 2,12% | | | | 211331303003509 | 30/04/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 149.875.000 | | | 149.875.000 | 8,62% | | | | 211331303005101 | 08/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 149.996.000 | | | 149.996.000 | 8,63% | | | | 211331303006598 | 15/07/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 79.951.300 | | | 79.951.300 | 4,60% | | | | 211331303006653 | 16/07/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 149.986.100 | | | 149.986.100 | 8,63% | | | | 211331303006922 | 28/07/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 100.045.000 | | | 100.045.000 | 5,75% | | | | 211331303007343 | 06/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 251.240.593 | | | 251.240.593 | 14,45% | | | | 211331701003350 | 25/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 32.725.000 | | | 32.725.000 | 1,88% | | | | 211331303008137 | 01/09/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 35.200.000 | | | 35.200.000 | 2,02% | | | | 211331303008322 | 03/09/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 149.875.000 | | | 149.875.000 | 8,62% | | | | 211331303008419 | 07/09/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 149.897.000 | | | 149.897.000 | 8,62% | | | | 211331303008473 | 09/09/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 32.912.000 | | | 32.912.000 | 1,89% | | | | 211331303011369 | 12/11/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 94.315.100 | | | 94.315.100 | 5,42% | | | | 211331303011949 | 24/11/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 21.957.500 | | | 21.957.500 | 1,26% | | | | 211331701006899 | 17/12/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 74.222.500 | | | 74.222.500 | 4,27% | | | | 211331701006899 | 17/12/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 7.142.020 | | | 7.142.020 | 0,72% | | | | 211331303000815 | 16/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.963.020 | | | 8.963.020 | 0,90% | | | | 211331303001853 | 18/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 564.560.000 | | | 564.560.000 | 56,54% | | | | 211331701000496 | 25/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 480.000 | | | 480.000 | 0,05% | | | | 211331303002118 | 29/03/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 9.160.000 | | | 9.160.000 | 0,92% | | | | 211331303004748 | 02/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 180.000 | | | 180.000 | 0,02% | | | | 211331303004953 | 04/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.652.800 | | | 5.652.800 | 0,57% | | | | 211331303005213 | 09/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.050.000 | | | 1.050.000 | 0,11% | | | | 211331303005327 | 11/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.278.000 | | | 2.278.000 | 0,23% | | | | 211331303005651 | 22/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.195.000 | | | 2.195.000 | 0,22% | | | | 211331303005864 | 28/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 49.514.366 | | | 49.514.366 | 4,96% | | | | 211331303005979 | 01/07/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 110.015.000 | | | 110.015.000 | 11,02% | | | | 211331303006829 | 28/07/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 52.277.850 | | | 52.277.850 | 5,24% | | | | 211331303007267 | 05/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 149.250.000 | | | 149.250.000 | 14,95% | | | | 211331303007398 | 09/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 19.355.000 | | | 19.355.000 | 1,94% | | | | 211331303007762 | 20/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 9.272.500 | | | 9.272.500 | 0,93% | | | | 211331303008137 | 01/09/2021 | | | | | | | | |
| 3.450.000 | | | 3.450.000 | 0,35% | | | | 211331303008879 | 20/09/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.025.600 | | | 2.025.600 | 0,20% | | | | 211331303009606 | 07/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 618.000 | | | 618.000 | 0,06% | | | | 211331303009839 | 12/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 380.000 | | | 380.000 | 0,04% | | | | 211331303009958 | 14/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 743.000 | | | 743.000 | 0,07% | | | | 211331701007543 | 27/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.000.000 | | | 48.994.000 | 97,99% | | | | 211.331.701.006.898 | 17/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH 285752 | | | | 2.787.392.000 | 2.786.384.009 | 2.786.384.009 | 99,96% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | 634171 | Puslitbang Transportasi Antarmoda | 772.525.000 | 521241 | 43.043.000 | | | 43.043.000 | 4,73% | | | | 211331302000723 | 05/03/2021 | Suplemen kesehatan, masker, rapid antigen | | | | | | | |
| | | | | | | 118.662.000 | | | 118.662.000 | 13,05% | | | | 211331701000890 | 20/04/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 77.000.000 | | | 77.000.000 | 8,47% | | | | 211331701001162 | 29/04/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 31.761.106 | | | 31.761.106 | 3,49% | | | | 211331302002153 | 04/05/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 22.527.070 | | | 22.527.070 | 2,48% | | | | 211331302003203 | 18/06/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 77.000.000 | | | 77.000.000 | 8,47% | | | | 211331701002454 | 01/07/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 29.448.296 | | | 29.448.296 | 3,24% | | | | 211331302001384 | 09/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 90.200.000 | | | 90.200.000 | 9,82% | | | | 211331701003285 | 23/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.793.292 | | | 5.793.292 | 0,64% | | | | 211331302004819 | 27/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 39.888.000 | | | 39.888.000 | 4,39% | | | | 211331302005379 | 20/09/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 90.200.000 | | | 90.200.000 | 9,82% | | | | 211331701004393 | 04/10/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 16.975.636 | | | 16.975.636 | 1,87% | | | | 211331302007092 | 11/11/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 30.250.000 | | | 30.250.000 | 3,33% | | | | 211331302007751 | 30/11/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 370.000 | | | 370.000 | 0,04% | | | | 211331302008170 | 08/12/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 99.000.000 | | | 99.000.000 | 10,89% | | | | 211331701006552 | 10/12/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | 400.000 | | | 400.000 | 0,04% | | | | 211331701007585 | 27/12/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | JUMLAH 634171 | | | | 772.525.000 | 772.518.400 | 772.518.400 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 909.360.000 | 521131 | 85.177.850 | | | 85.177.850 | | 9,37% | | | | 211331303000755 | 15/02/2021 | Suplemen Kesehatan Masker Sanitizer Herbal Lisensi Vidio Conference Komunikasi |
| | | | | | | | | | | | | 83.951.050 | | | 83.951.050 | | 9,23% | | | | 211331701000139 | 01/03/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | 62.079.350 | | | 62.079.350 | | 6,83% | | | | 211331303002010 | 24/03/2021 | |
| 61.880.550 | | | 61.880.550 | 6,80% | | | | | | | | | | 211331701001216 | 03/05/2021 | | | | | | | | |
| 72.555.844 | | | 72.555.844 | 7,98% | | | | | | | | | | 211331701001683 | 27/05/2021 | | | | | | | | |
| 80.269.869 | | | 80.269.869 | 8,83% | | | | | | | | | | 211331701002322 | 29/06/2021 | | | | | | | | |
| 69.780.050 | | | 69.780.050 | 7,67% | | | | | | | | | | 211331303006942 | 30/07/2021 | | | | | | | | |
| 3.291.670 | | | 3.291.670 | 0,36% | | | | | | | | | | 211331303007724 | 19/08/2021 | | | | | | | | |
| 70.968.550 | | | 70.968.550 | 7,80% | | | | | | | | | | 211331303007827 | 24/08/2021 | | | | | | | | |
| 70.985.050 | | | 70.985.050 | 7,81% | | | | | | | | | | 211331303005016 | 23/09/2021 | | | | | | | | |
| 6.591.515 | | | 6.591.515 | 0,72% | | | | 211331303010092 | 19/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.980.550 | | | 70.980.550 | 7,81% | | | | 211331303010472 | 28/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.250.418 | | | 3.250.418 | 0,36% | | | | 211331303011516 | 16/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|------------|--|
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 76.870.650 | 76.870.650 | 8,45% | 211331701006831 | 22/11/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 3.228.538 | 3.228.538 | 0,36% | 211331303012244 | 30/11/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 92.329.681 | 92.329.681 | 9,05% | 211331701006834 | 17/12/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 3.253.611 | 3.253.611 | 0,32% | 211331701006837 | 31/12/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0,51% | 211331303000318 | 28/01/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 19.158.930 | 19.158.930 | 3,82% | 211331701000139 | 01/03/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 10.310.000 | 10.310.000 | 1,95% | 211331303002010 | 24/03/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 9.417.000 | 9.417.000 | 1,78% | 211331303002069 | 16/04/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 27.754.500 | 27.754.500 | 5,24% | 211331701001216 | 03/02/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 7.975.000 | 7.975.000 | 1,51% | 211331303004442 | 21/02/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 10.968.500 | 10.968.500 | 2,07% | 211331303005584 | 18/05/2021 | swab antigen & PCR pegawai, biaya isolasi mandiri |
| | | | | | 12.000.000 | 12.000.000 | 2,27% | 211331701002222 | 29/02/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 7.221.000 | 7.221.000 | 1,35% | 211331303005623 | 14/07/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 8.547.500 | 8.547.500 | 1,62% | 211331303006707 | 16/09/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 8.263.000 | 8.263.000 | 1,57% | 211331303006796 | 28/05/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 46.675.000 | 46.675.000 | 8,95% | 211331701004383 | 01/10/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 19.487.188 | 19.487.188 | 3,63% | 211331303010082 | 19/10/2021 | swab antigen & PCR pegawai, biaya isolasi mandiri |
| | | | | | 17.670.000 | 17.670.000 | 3,34% | 211331701000660 | 29/10/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 30.478.000 | 30.478.000 | 5,78% | 211331303011516 | 16/11/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 7.350.000 | 7.350.000 | 1,39% | 211331303012244 | 30/11/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 60.389.500 | 60.389.500 | 11,41% | 211331701006837 | 31/12/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 1.214.631.874 | 1.214.631.874 | 84,59% | 211331303000881 | 17/02/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 39.193.919 | 39.193.919 | 12,09% | 211331303001343 | 03/03/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 3.550.000 | 3.550.000 | 1,19% | 211331303001515 | 10/03/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 6.622.264 | 6.622.264 | 2,84% | 211331303001989 | 24/03/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 32.904.000 | 32.904.000 | 10,94% | 211331303002482 | 05/04/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 1.494.600 | 1.494.600 | 0,49% | 211331303002822 | 25/04/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 1.738.000 | 1.738.000 | 0,57% | 211331303003334 | 27/04/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 11.678.638 | 11.678.638 | 3,82% | 211331303003395 | 05/05/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 12.171.600 | 12.171.600 | 4,01% | 211331303003902 | 05/05/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 11.267.000 | 11.267.000 | 3,71% | 211331303004388 | 18/05/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 5.004.000 | 5.004.000 | 1,59% | 211331303004702 | 31/05/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 2.674.000 | 2.674.000 | 0,89% | 211331303004704 | 31/05/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 33.028.024 | 33.028.024 | 10,89% | 211331303005439 | 15/06/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 374.677 | 374.677 | 0,12% | 211331303005726 | 28/06/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 5.621.600 | 5.621.600 | 1,82% | 211331303006169 | 30/07/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 5.480.493 | 5.480.493 | 1,81% | 211331303007448 | 12/08/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 1.320.000 | 1.320.000 | 0,43% | 211331303007448 | 27/08/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 1.283.178 | 1.283.178 | 0,42% | 211331303007878 | 03/09/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 6.710.000 | 6.710.000 | 2,21% | 211331303008200 | 03/09/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 5.094.600 | 5.094.600 | 1,69% | 211331303008698 | 08/10/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 1.485.000 | 1.485.000 | 0,49% | 211331303008779 | 11/10/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 30.240.000 | 30.240.000 | 9,69% | 211331303010083 | 19/10/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 18.061.000 | 18.061.000 | 5,39% | 211331303010789 | 03/11/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 61.995.000 | 61.995.000 | 19,93% | 211331303011178 | 10/11/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 18.298.783 | 18.298.783 | 6,02% | 211331701008176 | 31/12/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 393.469.394 | 393.469.394 | 89,98% | 211331303001047 | 24/02/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 2.112.982.000 | 2.112.982.000 | 0,37% | 211331701000110 | 01/03/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 72.620.000.000 | 72.620.000.000 | 12,81% | 211331303001283 | 23/03/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 15.108.262 | 15.108.262 | 2,67% | 211331303002287 | 19/04/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 698.000 | 698.000 | 0,12% | 211331303003001 | 19/04/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 6.049.189 | 6.049.189 | 1,07% | 211331701001278 | 05/05/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 34.841.000 | 34.841.000 | 6,15% | 211331701001388 | 10/05/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 68.696.000 | 68.696.000 | 12,10% | 211331303005735 | 23/06/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 5.027.269 | 5.027.269 | 0,89% | 211331303006004 | 01/07/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 4.929.385 | 4.929.385 | 0,87% | 211331303006876 | 28/07/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 10.099.894 | 10.099.894 | 1,78% | 211331303006904 | 28/07/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 12.713.478 | 12.713.478 | 2,24% | 211331701002898 | 02/08/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 74.710.000 | 74.710.000 | 13,14% | 211331303008043 | 30/08/2021 | swab antigen & PCR pegawai, biaya isolasi mandiri |
| | | | | | 20.816.147 | 20.816.147 | 3,87% | 211331701003473 | 30/08/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 30.662.000 | 30.662.000 | 5,39% | 211331303008072 | 24/09/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 2.078.330 | 2.078.330 | 0,37% | 211331701004299 | 30/09/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 35.265.000 | 35.265.000 | 6,22% | 211331303010183 | 21/10/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 9.642.022 | 9.642.022 | 1,69% | 211331701004880 | 25/10/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 35.310.000 | 35.310.000 | 6,23% | 211331701005962 | 18/11/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 40.690.000 | 40.690.000 | 7,21% | 211331303011833 | 22/11/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 19.059.273 | 19.059.273 | 3,36% | 211331303012408 | 09/12/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 6.057.424 | 6.057.424 | 1,07% | 211331303013209 | 12/12/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 13.631.689 | 13.631.689 | 2,49% | 211331701007435 | 29/12/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 34.970.000 | 34.970.000 | 6,17% | 211331303007887 | 29/12/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 11.240.657 | 11.240.657 | 1,99% | 211331303001047 | 24/02/2021 | penunjang kesehatan pegawai (vitamin, masker), lisensi zoom, prosesor online, biaya komunikasi pegawai |
| | | | | | 16.053.000 | 16.053.000 | 9,89% | 211331303001118 | 01/03/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 3.600.000 | 3.600.000 | 2,25% | 211331303001983 | 23/03/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 4.060.000 | 4.060.000 | 2,63% | 211331303003001 | 19/04/2021 | |
| 4 | 414287 | Puslibang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Pelayaran | 303.520.000 | 621131 | 35.422.000 | 35.422.000 | 22,09% | 211331701001365 | 10/05/2021 | Pembelian masker, Test PCR dan Swab, Biaya Komunikasi dll |
| | | | | | 1.600.000 | 1.600.000 | 1,12% | 211331303005755 | 23/06/2021 | |
| 5 | 258951 | Puslibang Transportasi Udara | 150.330.000 | 621241 | 389.000 | 389.000 | 0,25% | 211331303006904 | 29/07/2021 | swab antigen & PCR pegawai, biaya isolasi mandiri |
| | | | | | 6.394.000 | 6.394.000 | 3,99% | 211331303007895 | 19/08/2021 | |
| 3 | 414287 | Puslibang Transportasi Jalan dan Perkeretaapalan | 629.200.000 | 621241 | 43.684.000 | 43.684.000 | 27,37% | 211331303008043 | 30/08/2021 | Anjangan dan PCR |
| | | | | | 11.894.410 | 11.894.410 | 7,42% | | | |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

KEPUTUSAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK-BLT 104 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER, TBK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan terdapat Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan kantor seluas 11,5m² (sepuluh meter persegi) berupa Bangunan Atap yang akan disewakan kepada PT. Telekomunikasi Seluler;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan kepada PT. Telekomunikasi Seluler.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KM.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara.

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Telekomunikasi Seluler Nomor 326/TC.01/RQ-51/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Informasi Perpanjangan Sewa Site;
 2. Surat Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Nomor PL.101/1/3-BLT-2021 tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara oleh PT. Telekomunikasi Seluler pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1;
 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-183/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEPADA PT TELEKOMUNIKASI SELULER.

- PERTAMA** : Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dalam bentuk sewa Barang Milik Negara kepada PT. Telekomunikasi Seluler. selama 3 (tiga) tahun berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dengan total luasan 11,5m² (delapan belas koma delapan puluh empat meter persegi) dengan nilai sewa Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), belum termasuk PPN dan PPh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan ini.
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dan ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dan Pihak Penyewa setelah seluruh pembayaran uang disetor ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian, dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa-Menyewa.
- KETIGA** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Sewa-Menyewa Barang Milik Negara dimaksud.

KEEMPAT : Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai dengan Perjanjian Sewa-Menyewa atas Barang Milik Negara dimaksud.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2021

a.n MENTERI PERHUBUNGAN,
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN



PANDU YUNianto
NIP. 19650606 198803 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
4. Kepala Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;
9. Direktur Utama PT. Telekomunikasi Seluler.



PERJANJIAN KERJASAMA

Telkomsel

ANTARA

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. TELEKOMUNIKASI SELULER

TENTANG

SEWA ATAS SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR PIHAK PERTAMA : KL.003/1/3/BLT/2021
NOMOR PIHAK KEDUA : PKS. 1791/LG.05/KV-04/XII/2021

PADA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 5 KEC. GAMBIR, KOTAMADYA
JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA, DESEMBER 2021



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

Telkomsel!

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI SELULER
TENTANG
SEWA ATAS SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR PIHAK PERTAMA : **KL.003/1/2/BLT/2021**
NOMOR PIHAK KEDUA : **PKS. 1791/LG.05/KV-04/XII/2021**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-12-2021) di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:-----

- I. **PANDU YUNianto** selaku Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----
- II. **NUGROHO ADI WIBOWO** selaku General Manager Network Service Assurance Inner Jabotabek yang berkedudukan di Gd. Telkom Landmark Tower Menara 1 Lt. 1-23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki bangunan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak di Bidang Pelayanan Telekomunikasi.
3. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyewakan sebagian bangunan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini pula sepakat untuk menyewa sebagian bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka pengembangan pelayanan telekomunikasi, **PIHAK KEDUA** masih memerlukan tempat untuk penempatan peralatan

telekomunikasi dengan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama".

4. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan Untuk Pemasangan Base Transceiver Station sistem telekomunikasi seluler dan Perangkat Pendukung nomor PKS. 146A/LG.05/AR-002/XI/2012 tahun 2012, (selanjutnya disebut "Perjanjian awal")
5. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan No. BAK. 387/TC.01/KV-03/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 (selanjutnya disebut "Berita Acara") sebagaimana direkatkan pada Perjanjian ini sebagai Lampiran I

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta seluas 11,5m², dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);-----
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);---
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);-
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);-----
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);-----
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);-----

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);--
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;-----
10. Surat Kepala KPKNL Jakarta 1 atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-109/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan;-----
11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. SK-BLT 104 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Kepada PT. Telekomunikasi Seluler.---

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menyewakan sebagian bangunan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut "Objek Sewa" kepada **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan sebagai penempatan peralatan telekomunikasi.-----

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyerahkan sebagian bangunan seluas 11,5m² yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk dikelola dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
 - b. Memperoleh uang sewa dari **PIHAK KEDUA** sebagai kontribusi dari pemanfaatan bangunan;-----
 - c. Menjamin bangunan yang menjadi objek dalam perjanjian ini tidak dalam sengketa atau digunakan oleh pihak lain;-----
 - d. Melarang **PIHAK KEDUA** untuk memindahtangankan hak sewa kepada **PIHAK KETIGA**;-----
 - e. Memberikan persetujuan terhadap pembangunan/perubahan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Membayar sekaligus uang sewa bangunan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan menyetorkan ke Kas Umum Negara melalui Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Rekening Bendahara Penerimaan

- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan menyerahkan bukti setor;-----
- b. Menanggung segala biaya operasional dan pemeliharaan terhadap bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang digunakan **PIHAK KEDUA** di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;-----
 - c. Mengembalikan bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta kepada **PIHAK PERTAMA** apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir dalam keadaan sama sewaktu penyerahan;-----
 - d. Bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan objek sewa dari pihak lain;-----
 - e. Tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain.---

Pasal 4

HARGA SEWA

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas harga sewa bangunan milik **PIHAK PERTAMA**, harga sewa di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dengan luas 11,5m² yaitu Rp. 210.000.000 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) untuk jangka waktu sewa selama 3 (*Tiga*) Tahun;-----
- (2) Harga sewa yang ditetapkan sebagai dasar harga sewa bangunan **PIHAK PERTAMA** didasarkan pada tarif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan;---
- (3) Harga sewa yang ditetapkan sebagai dasar harga sewa bangunan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini dapat berubah berdasarkan penetapan tarif yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- (4) Pemberlakuan tarif dalam perjanjian ini sebagai akibat perubahan tarif yang ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal ini dimulai berlakunya sejak **PARA PIHAK** melakukan adendum perjanjian terkait tarif;-----
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap bangunan dan pajak-pajak lain yang ditetapkan pemerintah yang timbul berdasarkan perjanjian ini serta sepanjang tidak ada peraturan lain mengenai pajak yang akan ditetapkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab dan harus dibayar **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas total harga sewa seluruh **PIHAK PERTAMA** dengan pembayaran lunas dimuka untuk jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian ini;-----
- (2) Nota Tagihan (*invoice*) yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilampirkan dokumen pendukung tagihan sebagai berikut:
 - a. Surat tagihan sewa atas Barang Milik Negara;
 - b. Bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Salinan perjanjian ini.

- (3) Pembayaran atas harga sewa bangunan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tempat atau rekening yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu berlakunya perjanjian selama 3 (*Tiga*) Tahun terhitung mulai tanggal **07-10-2021** dan akan berakhir pada tanggal **06-10-2024**;-----
- (2) Dalam hal perjanjian ini berakhir berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan bangunan yang disewanya kepada **PIHAK PERTAMA**;-----
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi atas perjanjian ini setiap 1(*Satu*) tahun sekali;-----
- (4) Apabila perjanjian ini diperpanjang oleh **PIHAK KEDUA** maka perjanjian harus telah dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (*Tiga*) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;-----
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam waktu berdasarkan ketentuan ayat 2 (*Dua*) pasal ini tidak menyerahkan bangunan yang dimaksud maka **PIHAK KEDUA** menyetujui **PIHAK PERTAMA** untuk mengambil kembali bangunan tersebut dengan cara-cara menuntut **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 7

ASURANSI

- (1) Selama berlangsungnya jangka waktu sewa menyewa **PIHAK KEDUA** wajib menutup dan membayar asuransi atas kerugian yang mungkin akan timbul terhadap bangunan objek sewa yang di atasnya terdapat bangunan milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau seluruh barang dan perlengkapan milik **PIHAK PERTAMA**;-----
- (2) Bukti asuransi sebagaimana pada ayat 1 wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu pelaksanaan penandatanganan perjanjian.-----

Pasal 8

LARANGAN PENGALIHAN

PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.-----

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya;-----

- (2) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) pasal ini diberikan setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (*Tiga*) kali masing-masing berlaku 30 (*Tiga Puluh*) hari setelah diterimanya surat peringatan.--
- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (*Satu*) pasal ini dilakukan secara tertulis.-----
- (4) Perjanjian sewa menyewa bangunan atas objek ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila: Jangka berlakunya perjanjian telah berakhir.-----
 - a) **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit dengan suatu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*).-----
 - b) **PIHAK KEDUA** telah dicabut ijin operasionalnya oleh pihak yang berwenang.---
- (5) Untuk keperluan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengutamakan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.-----

Pasal 10

PENYERAHAN BANGUNAN PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila perjanjian ini berakhir karena telah berakhirnya jangka waktu sewa, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali bangunan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender setelah diterimanya permintaan/pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengosongkan dan penyerahan bangunan tersebut.-----
- (2) Apabila setelah **PIHAK KEDUA** mengosongkan dan menyerahkan bangunan kepada **PIHAK PERTAMA** masih juga terdapat barang/mesin/peralatan milik **PIHAK KEDUA** yang tertinggal diatas bangunan yang disewakan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memindahkan barang/mesin/peralatan tersebut dengan cara yang dianggap baik dan wajar. **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan dan/atau keberatan-keberatan yang mungkin dapat diajukan terhadap **PIHAK PERTAMA** berkenaan dengan pemindahan barang/mesin/peralatan tersebut diatas.-----
- (3) Apabila pihak kedua lalai untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan yang disewakan pada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) diatas maka **PIHAK PERTAMA** berhak membongkar bangunan yang ada diatas bangunan tersebut dan menguasainya dengan cara yang dirasa baik oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa perlu minta izin dari pengadilan atau instansi yang berwenang.---
- (4) Hak untuk melakukan sendiri pengosongan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atas bangunan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sehingga untuk itu suatu surat kuasa khusus tidak diperlukan.-----
- (5) Lagi, jika **PIHAK KEDUA** cidera janji dan **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan haknya.-----
- (6) **PIHAK KEDUA** tidak berhak, setelah penyerahan bangunan kepada **PIHAK PERTAMA** atau sesudahnya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang pindah ataupun pembayaran atapun pengganti lainnya dari biaya-biaya yang mungkin telah dikeluarkannya untuk peningkatam, memperbaiki atau merawat bangunan.-----

- (7) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam ayat-ayat diatas akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir atau diputuskan.-----

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang tidak terduga yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, perang, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik dan/atau bencana alam.-----
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sehingga mengakibatkan kerugian dan biaya yang diderita pihak tersebut, tidak merupakan tanggung jawab pihak lain dan apabila *force majeure* tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali.-----

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila cara mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapainya kata sepakat dalam 6 (*Enam*) bulan, maka **PARA PIHAK** memilih untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

Pasal 13

PERUBAHAN

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Perjanjian ini apabila perlu diatur kemudian dalam suatu adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (*Dua*) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA



PANDU YUNANTO

PIHAK KEDUA



NUGROHO ADI WIBOWO



Nomor : S-183/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 07 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan

Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian Perhubungan
Jalan Merdeka Timur Nomor 5
Jakarta 10110

Sehubungan dengan 3 (tiga) surat Saudara Nomor PL.101/1/3/BLT/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara, Nomor PL.001/1/3/BLT/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Kelengkapan Data Usulan Pemanfaatan BMN, dan Nomor PL.001/1/4/BLT/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Konfirmasi Data Usulan Pemanfaatan BMN, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dengan total luas 11,5m² yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, dan total nilai perolehan proporsional sebesar Rp.23.854.151,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah) selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada PT. Telekomunikasi Seluler untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan total nilai sewa sebesar Rp.210.000.000,00. (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus di awal.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan perjanjian sewa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I), yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.

3. Penyewaan.../hal.2



-2-

3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta I



Wildan Ahmad Fananto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410
Telepon (021) 34835131 Faksimile (021) 34835131





Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S- 183 /MK.6/WKN.07/KNL.01/2021
Tanggal : 07 Oktober 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
KEPADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER

| No. | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Lokasi | Luas yang Disewakan | Jangka Waktu | Periodesitas | Total Nilai Sewa Selama 3 tahun dibayar sekaligus di Awal (Rp) | Penyewa |
|-------|-------------|-----|---------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4010101001 | 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat | 11,5 m2 | 3 Tahun | 3 Tahunan | 210.000.000,00. | PT. Telekomunikasi Seluler |
| Total | | | | | | | | 210.000.000,00. | |

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta I



Wildan Ahmad Fananto



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820211108978344
Tanggal Billing : 08-11-2021 09:05:19
Tanggal Kedaluwarsa : 15-11-2021 09:05:19
Tanggal Bayar : 11-11-2021 10:49:50
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : *Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan*
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Total Disetor : 210.000.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Ratus Sepuluh Juta (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000548286
NTPN : 6B8E848VUJDE97L8

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 210.000.000 (IDR)
Keterangan : Sewa Atas Sebagian Tanah/Bangunan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Tanggal dan Jam Bayar | 11/11/2021 10:49:50 | NTB/NTP | 000000548286 |
| Tanggal Buku | 11/11/2021 | NTPN | 6B8E848VLUJDE07LR |
| Kode Cabang Bank | 0989-BNI 46 | STAN | 132738 |

Data Setoran :

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-----|
| Kode Billing | 820211108978344 | | |
| Nama Wajib Pajak | SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN | | |
| Kementerian/Lembaga | 022 | | |
| Unit Eselon I | 11 | | |
| Satuan Kerja | 288752 | | |
| Jumlah Setoran | 210000000 | Mata Uang : | IDR |
| Terbilang | Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah | | |

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : BAK. 387/TC.01/KV-03/XI/2021

Nama Site / Site ID : KWINIMD / JKP057
 Lokasi Site : Gd. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
 Nama Pemilik / Pengelola : Badan Litbang Kementerian Perhubungan
 Alamat Pemilik / Pengelola : Gd. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
 Person In Charge : Pandu Yuniarto
 Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 Telepon / Fax : 021 - 34833061
 Email : balitbanghub@dephub.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Litbang Kementerian Perhubungan**, berdasarkan **BERITA ACARA NEGOSIASI perpanjangan sewa**, tertanggal 07 Oktober 2021, menyatakan setuju untuk menyewakan atau memperpanjang sewa lahan atau tempat untuk penempatan perangkat Telekomunikasi Selular serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, melanjutkan atau mengamandemen perjanjian nomor : PKS. 146A/LG.05/AR-002/XI/2012.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 1. | Lama sewa | : 3 tahun | Periode sewa : 07 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2024 |
| 2. | Harga sewa/tahun | : Rp. 70.000.000,- / Tahun , * | |
| 3. | Total Harga sewa | : Rp. 210.000.000,- / 3 (tiga) Tahun * | |
| 4. | Lokasi/Tempat sewa | : Rooftop | |
| 5. | Luas Tempat Sewa | : 2m x 3m dan Termasuk akses jalan menuju lokasi | |
| 6. | Ketentuan Harga Sewa | - Tidak Termasuk Biaya Notaris - Tidak Termasuk Biaya Listrik - Termasuk PPh - Tidak Termasuk PPN - Termasuk PBB | |
| 7. | Cara Pembayaran | Di bayar 3 tahun di muka Ke Kas Negara dengan menggunakan Simponi | |
| 8. | Status Properti | Milik Negara | |
| 9. | Perjanjian Sewa | Tanpa Notaris | |
| 10. | Surat-surat kepemilikan | <input type="checkbox"/> IMB <input type="checkbox"/> Sertifikat Tanah <input type="checkbox"/> Akta Jual Beli nomor <input type="checkbox"/> SPPT / PBB nomor | |
| 11. | NPWP | <input checked="" type="checkbox"/> Ada dan Terlampir <input type="checkbox"/> Tidak Ada | |
| | | - Nama | : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
| | | - No. NPWP | : 00.145.914.8-025.000 |

Dengan ini Pemilik menyatakan bahwa

- Menjamin bahwa benar Tempat tersebut di atas adalah milik atau dikelola oleh Badan Litbang Kementerian Perhubungan
- Membenarkan akses jalan 24 Jam menuju lokasi Tempat yang disewakan
- Mengizinkan pihak PT. Telekomunikasi Selular dan atau Mitra PT. Telekomunikasi Selular untuk memasuki lokasi Tempat yang disewakan 24 jam baik di dalam maupun di luar jam kerja atau sesuai kesepakatan
- Menjamin Pihak PT. Telekomunikasi Selular tidak akan mendapat gugatan dari pihak manapun yang berkaitan dengan Tempat yang disewakan tersebut
- Menyetujui penempatan perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukungnya yang tanintegrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan suatu sistem telekomunikasi pada tempat/lahan bangunan yang disewakan
- Dengan ditandatanganinya BAK ini, Pemilik tidak dapat mengalihkan Tempat/lahan yang disewakan tersebut kepada pihak ketiga
- Berita Acara ini bukan sebagai dasar penagihan atau pembayaran sewa
- Harga sewa tidak potong PPh karena disetor ke Kas Negara sebagai PNBP
- Total Harga Nett yang diterima Kas Negara sebesar Rp. 210.000.000,-

Jakarta, 07 Oktober 2021

Badan Litbang Kementerian Perhubungan

PT. Telekomunikasi Selular



Pandu Yuniarto
 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Ade Mulyono
 General Manager Network Deployment And Control Jabotabek Jabar

Nugroho Adi Wibowo
 General Manager Network Service Assurance Inner Jabotabek

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : BAK. 387/TC.01/KV-03/X/2021

Nama Site / Site ID : KWINIMD / JKP057
Lokasi Site : Gd. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
Nama Pemilik / Pengelola : Badan Litbang Kementerian Perhubungan
Alamat Pemilik / Pengelola : Gd. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
Person In Charge : Pandu Yunianto
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Telepon / Fax : 021 – 34833061
Email : balitbanghub@dephub.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Litbang Kementerian Perhubungan**, berdasarkan **BERITA ACARA NEGOSIASI perpanjangan sewa**, tertanggal 07 Oktober 2021, menyatakan setuju untuk menyewakan atau memperpanjang sewa lahan atau tempat untuk penempatan perangkat Telekomunikasi Selular serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, melanjutkan atau mengamandemen perjanjian nomor : PKS. 146A/LG.05/AR-002/XI/2012.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama sewa : 3 tahun Periode sewa : 07 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2024
2. Harga sewa/tahun : Rp. 70.000.000,- / Tahun *
3. Total Harga sewa : Rp. 210.000.000,- / 3 (tiga) Tahun *
4. Lokasi/Tempat sewa : Rooftop
5. Luas Tempat Sewa : 2m x 3m dan Termasuk akses jalan menuju lokasi
6. Ketentuan Harga Sewa :
 - Tidak Termasuk Biaya Notaris
 - Tidak Termasuk Biaya Listrik
 - Termasuk PPh
 - Tidak Termasuk PPN
 - Termasuk PBB
7. Cara Pembayaran : Di bayar 3 tahun di muka Ke Kas Negara dengan menggunakan Simponi
8. Status Properti : Milik Negara
9. Perjanjian Sewa : Tanpa Notaris
10. Surat-surat kepemilikan :
 - IMB
 - Sertifikat Tanah
 - Akta Jual Beli nomor
 - SPPT / PBB nomor
11. NPWP :
 - Ada dan Terlampir
 - Tidak Ada
 - Nama : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - No. NPWP : 00.145.914.8-025.000

Dengan ini Pemilik menyatakan bahwa

- a. Menjamin bahwa benar Tempat tersebut di atas adalah milik atau dikelola oleh Badan Litbang Kementerian Perhubungan
- b. Membenarkan akses jalan 24 Jam menuju lokasi Tempat yang disewakan
- c. Mengizinkan pihak PT. Telekomunikasi Selular dan atau Mitra PT. Telekomunikasi Selular untuk memasuki lokasi Tempat yang disewakan 24 jam baik di dalam maupun di luar jam kerja atau sesuai kesepakatan
- d. Menjamin Pihak PT. Telekomunikasi Selular tidak akan mendapat gugatan dari pihak manapun yang berkaitan dengan Tempat yang disewakan tersebut
- e. Menyetujui penempatan perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukungnya yang terintegrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem telekomunikasi pada tempat/lahan/bangunan yang disewakan
- f. Dengan ditandatanganinya BAK ini, Pemilik tidak dapat membatalkan Tempat/lahan yang disewakan tersebut kepada pihak ketiga
- g. Berita Acara ini bukan sebagai dasar pengalihan atau pembayaran sewa
- h. Harga sewa tidak dipotong PPh karena disetor ke Kas Negara sebagai PNPB
- i. Total Harga Nett yang diterima Kas Negara sebesar Rp. 210.000.000,-

Jakarta, 07 Oktober 2021

Badan Litbang Kementerian Perhubungan

PT. Telekomunikasi Selular

Pandu Yunianto
Sekretaris Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan

Ade Mulyono
General Manager Network Deployment
And Control Jabotabek Jabar

Nugroho Adi Wibowo
General Manager Network Service
Assurance Inner Jabotabek

BERITA ACARA NEGOSIASI PERPANJANGAN SEWA

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07, bulan Oktober, tahun 2021, telah dilakukan negosiasi dengan Pemilik tempat/gedung atau yang dikuasakan, untuk transaksi penyewaan tempat/gedung di:

Nama site / Site ID : KWINIMD / JKP057
Alamat site : Gd. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
Luas lahan : 2m x 3m
Akses Jalan : Ada
Nama Pemilik / Pengelola : Badan Litbang Kementerian Perhubungan

Dengan proses sebagai berikut:

1. Penawaran pertama

| | |
|-----------|--|
| Pemilik | Rp. 70.000.000,- /tahun (include PPh, exclude PPN) |
| Telkomsel | Rp. 70.000.000,- /tahun (include PPh, exclude PPN) |

Harga sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 70.000.000,- per tahun include PPh dan exclude PPN.
***Harga sewa tidak dipotong PPh karena disetor ke Kas Negara sebagai PNBP**

Demikian negosiasi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Litbang Kementerian Perhubungan

Negosiator



Pandu Yuniarto
Sekretaris Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan



Rohmad Hartono
Infrastructure Management Jabotabek

Odistrict Operation

Mengetahui



Rahmat Hidayat
Manager Infrastructure Management Jabotabek

Manager Network Service

BERITA ACARA NEGOSIASI PERPANJANGAN SEWA

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07, bulan Oktober, tahun 2021, telah dilakukan negosiasi dengan Pemilik tempat/gedung atau yang dikuasakan, untuk transaksi penyewaan tempat/gedung di:

Nama site / Site ID : KWINIMD / JKP057
Alamat site : Gd. Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
Luas lahan : 2m x 3m
Akses Jalan : Ada
Nama Pemilik / Pengelola : Badan Litbang Kementerian Perhubungan

Dengan proses sebagai berikut:

1. Penawaran pertama

| | |
|-----------|---|
| Pemilik | Rp. 70.000.000,- / tahun (include PPh, exclude PPN) |
| Telkomsel | Rp. 70.000.000,- / tahun (include PPh, exclude PPN) |

Harga sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 70.000.000,- per tahun include PPh dan exclude PPN.
***Harga sewa tidak dipotong PPh karena disetor ke Kas Negara sebagai PNBP**

Demikian negosiasi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Litbang Kementerian Perhubungan

Negosiator



Pandu Yuniarto
Sekretans Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan



Rohmad Hartono
Infrastructure Management Jabotabek

Odistrict Operation

Mengetahui



Rahmat Hidayat
Manager Infrastructure Management Jabotabek

Manager Network Service



PERJANJIAN KERJASAMA

STP

ANTARA

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK

TENTANG

SEWA ATAS SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR PIHAK PERTAMA : **KL.003/1/2/BLT/2021**
NOMOR PIHAK KEDUA : **491/A2/LLM-PKS-STP/VIII/2021**

PADA JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 5 KEC. GAMBIR, KOTAMADYA
JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA, JUNI 2021



PERJANJIAN KERJASAMA

STP

ANTARA

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK

TENTANG

SEWA ATAS SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR PIHAK PERTAMA : KL.003/11/2/BLT/2021
NOMOR PIHAK KEDUA : 491/A2/LLM-PRK5-STP/VI/12021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:-----

- I. **PANDU YUNianto** selaku Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----
- II. **Tjhin Khe Mei** selaku Direktur PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk yang berkedudukan di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar Jakarta 12210, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki bangunan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak di Bidang Pelayanan Telekomunikasi.
3. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyewakan sebagian bangunan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini pula sepakat untuk menyewa sebagian bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka pengembangan pelayanan telekomunikasi, **PIHAK KEDUA** masih memerlukan tempat untuk penempatan peralatan telekomunikasi dengan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**".

| | |
|---------------|--|
| PIHAK PERTAMA | |
| PIHAK KEDUA | |

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta seluas 18,84m², dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);-----
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);-----
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);-----
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);-----
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);-----
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);-----
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);-----
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;-----
10. Surat Kepala KPKNL Jakarta 1 atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-109/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan;-----

| | |
|---------------|---|
| PIHAK PERTAMA |  |
| PIHAK KEDUA | |

11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. SK-BLT 83 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Kepada PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk.-----

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menyewakan sebagian bangunan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut "Objek Sewa" kepada **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan sebagai penempatan peralatan telekomunikasi.-----

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Menyerahkan sebagian bangunan seluas 18,84m² yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk dikelola dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
 - b. Memperoleh uang sewa dari **PIHAK KEDUA** sebagai kontribusi dari pemanfaatan bangunan;-----
 - c. Menjamin bangunan yang menjadi objek dalam perjanjian ini tidak dalam sengketa atau digunakan oleh pihak lain;-----
 - d. Melarang **PIHAK KEDUA** untuk memindahtangankan hak sewa kepada **PIHAK KETIGA**;-----
 - e. Memberikan persetujuan terhadap pembangunan/perubahan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Membayar sekaligus uang sewa bangunan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan menyetorkan ke Kas Umum Negara melalui Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Rekening Bendahara Penerimaan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan menyerahkan bukti setor;-----
 - b. Menanggung segala biaya operasional dan pemeliharaan terhadap bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang digunakan **PIHAK KEDUA** di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;-----
 - c. Mengembalikan bangunan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta kepada **PIHAK PERTAMA** apabila perjanjian sewa menyewa ini berakhir dalam keadaan sama sewaktu penyerahan;-----
 - d. Bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan objek sewa dari pihak lain;-----

| | |
|---------------|---|
| PIHAK PERTAMA | |
| PIHAK KEDUA |  |

e. Tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain.-----

Pasal 4

HARGA SEWA

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas harga sewa bangunan milik **PIHAK PERTAMA**, harga sewa di Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Kec. Gambir Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dengan luas 18,84m² yaitu Rp. 158.090.000 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) untuk jangka waktu sewa selama 3 (*Tiga*) Tahun;-----
- (2) Harga sewa yang ditetapkan sebagai dasar harga sewa bangunan **PIHAK PERTAMA** didasarkan pada tarif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan;-----
- (3) Harga sewa yang ditetapkan sebagai dasar harga sewa bangunan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini dapat berubah berdasarkan penetapan tarif yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- (4) Pemberlakuan tarif dalam perjanjian ini sebagai akibat perubahan tarif yang ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal ini dimulai berlakunya sejak **PARA PIHAK** melakukan adendum perjanjian terkait tarif;-----
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap bangunan dan pajak-pajak lain yang ditetapkan pemerintah yang timbul berdasarkan perjanjian ini serta sepanjang tidak ada peraturan lain mengenai pajak yang akan ditetapkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab dan harus dibayar **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas total harga sewa seluruh **PIHAK PERTAMA** dengan pembayaran lunas dimuka untuk jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian ini;-----
- (2) Nota Tagihan (*invoice*) yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilampirkan dokumen pendukung tagihan sebagai berikut:
 - a. Surat tagihan sewa atas Barang Milik Negara;
 - b. Bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Salinan perjanjian ini.
- (3) Pembayaran atas harga sewa bangunan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tempat atau rekening yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu berlakunya perjanjian selama 3 (*Tiga*) Tahun dihitung mulai tanggal 30-06-2021 dan akan berakhir pada tanggal 30-06-2024;-----
- (2) Dalam hal perjanjian ini berakhir berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan bangunan yang disewanya kepada **PIHAK PERTAMA**;-----

| | |
|---------------|---|
| PIHAK PERTAMA | |
| PIHAK KEDUA |  |

- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi atas perjanjian ini setiap 1 (*Satu*) tahun sekali;-----
- (4) Apabila perjanjian ini diperpanjang oleh **PIHAK KEDUA** maka perjanjian harus telah dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (*Tiga*) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;-----
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam waktu berdasarkan ketentuan ayat 2 (*Dua*) pasal ini tidak menyerahkan bangunan yang dimaksud maka **PIHAK KEDUA** menyetujui **PIHAK PERTAMA** untuk mengambil kembali bangunan tersebut dengan cara-cara menuntut **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 7

ASURANSI

- (1) Selama berlangsungnya jangka waktu sewa menyewa **PIHAK KEDUA** wajib menutup dan membayar asuransi atas kerugian yang mungkin akan timbul terhadap bangunan objek sewa yang di atasnya terdapat bangunan milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau seluruh barang dan perlengkapan milik **PIHAK PERTAMA**;-----
- (2) Bukti asuransi sebagaimana pada ayat 1 wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu pelaksanaan penandatanganan perjanjian.-----

Pasal 8

LARANGAN PENGALIHAN

PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.-----

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya;-----
- (2) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (*Satu*) pasal ini diberikan setelah **PIHAK PERTAMA** memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (*Tiga*) kali masing-masing berlaku 30 (*Tiga Puluh*) hari setelah diterimanya surat peringatan.-----
- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (*Satu*) pasal ini dilakukan secara tertulis.-----
- (4) Perjanjian sewa menyewa bangunan atas objek ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:-----
 - a) **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit dengan suatu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*).-----
 - b) **PIHAK KEDUA** telah dicabut ijin operasionalnya oleh pihak yang berwenang.-----
- (5) Untuk keperluan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengutamakan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.-----

| | |
|---------------|---|
| PIHAK PERTAMA |  |
| PIHAK KEDUA | , |

Pasal 10

PENYERAHAN BANGUNAN PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila perjanjian ini berakhir karena telah berakhirnya jangka waktu sewa, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali bangunan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender setelah diterimanya permintaan/pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengosongkan dan penyerahan bangunan tersebut.-----
- (2) Apabila setelah **PIHAK KEDUA** mengosongkan dan menyerahkan bangunan kepada **PIHAK PERTAMA** masih juga terdapat barang/mesin/peralatan milik **PIHAK KEDUA** yang tertinggal diatas bangunan yang disewakan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memindahkan barang/mesin/peralatan tersebut dengan cara yang dianggap baik dan wajar. **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan dan/atau keberatan-keberatan yang mungkin dapat diajukan terhadap **PIHAK PERTAMA** berkenaan dengan pemindahan barang/mesin/peralatan tersebut diatas.-----
- (3) Apabila pihak kedua lalai untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan yang disewakan pada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) diatas maka **PIHAK PERTAMA** berhak membongkar bangunan yang ada diatas bangunan tersebut dan menguasainya dengan cara yang dirasa baik oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa perlu minta izin dari pengadilan atau instansi yang berwenang.-----
- (4) Hak untuk melakukan sendiri pengosongan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atas bangunan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sehingga untuk itu suatu surat kuasa khusus tidak diperlukan.-----
- (5) Lagi, jika **PIHAK KEDUA** cidera janji dan **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan haknya.-----
- (6) **PIHAK KEDUA** tidak berhak, setelah penyerahan bangunan kepada **PIHAK PERTAMA** atau sesudahnya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang pindah ataupun pembayaran atau pengganti lainnya dari biaya-biaya yang mungkin telah dikeluarkannya untuk peningkatam, memperbaiki atau merawat bangunan.-----
- (7) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam ayat-ayat diatas akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir atau diputuskan.-----

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang tidak terduga yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, perang, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik dan/atau bencana alam.-----
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sehingga mengakibatkan kerugian dan biaya yang diderita pihak tersebut, tidak merupakan tanggung jawab pihak lain dan apabila *force majeure* tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali.-----

| | |
|---------------|---|
| PIHAK PERTAMA | |
| PIHAK KEDUA |  |

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila cara mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapainya kata sepakat dalam 6 (*Enam*) bulan, maka **PARA PIHAK** memilih untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

Pasal 13

PERUBAHAN

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Perjanjian ini apabila perlu diatur kemudian dalam suatu adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (*Dua*) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA

PANDU YUNIANTO

PIHAK KEDUA

TJHIN KHE MEI

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEMPATAN PERANGKAT
ANTARA
BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
SITE JKJP0073/GAMBIR
DENGAN
PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK
NO. 007/BAK-STP/Renewal/Area 2/(VII)/2021**

Berita acara kesepakatan ini dibuat pada hari Selasa tanggal Enam bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (Selasa, 06 – 07 – 2021) bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

I.

Nama Kuasa : PANDU YUNianto
Alamat : JL. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat
Nomor Telepon/ Email : (021) 34833060
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II.

PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK
Nama Kuasa : REINY MARLINA
Alamat : JL. Tentara Pelajar Jakarta 12210
Nomor Telepon/ Email : (021) 5794 0688
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat Berita Acara Kesepakatan untuk Perpanjangan Penempatan Perangkat pada site **JKJP0073/GAMBIR** (untuk selanjutnya disebut Berita Acara Kesepakatan Penempatan Perangkat), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penanggung jawab tanah/lahan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling menyetujui dan sepakat atas penempatan perangkat milik **PIHAK KEDUA** di lahan **PIHAK PERTAMA**.
3. Atas penempatan perangkat tersebut sebagaimana mengacu pada Surat dari KPKNL No. S-109/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 bahwa besaran nilai atas sewa selama 3 tahun untuk luas sewa 18,84m², senilai total Rp. 158.090.000 (belum termasuk PPN) untuk periode 30 Juni 2021 s.d 30 Juni 2024 dimana tanggal periode sewa akan terbit paling lambat 10 hari setelah **PIHAK KEDUA** membayarkan total sewa tersebut.
4. **PARA PIHAK** telah saling menyetujui dan sepakat bahwa Berita Acara Kesepakatan Penempatan Perangkat ini kedudukannya setara dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang di pergunakan sebagai administrasi proses di PT.Solusi Tunas Pratama untuk proses pembayaran hingga proses penandatanganan PKS selesai dilakukan oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penempatan Perangkat ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Juli 2021

PIHAK PERTAMA
BADAN LITBANG PERHUBUNGAN



Pandu Yuniarto
Sekretaris Badan Litbang Perhubungan

PIHAK KEDUA
PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK

Reiny Marlina
Renewal



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Nama Bank

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

Kementerian Keuangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar

: 19/08/2021 11:12:55

Tanggal Buku

: 19/08/2021

Kode Cabang Bank

: 047007 - Internet Banking

NTB

: 031417997047

NTPN

: 5007056DEDN451

STAN

: 222538

Data Setoran:

Kode Billing

: 820210816927136

Nama Wajib Bayar

: SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Kementerian / Lembaga

: 022

Unit Eselon I

: 11

Satuan Kerja

: 288752

Jumlah Setoran

: 158,090,000.00

Terbilang

: Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu

Mata Uang : IDF

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210816927136
Tanggal Billing : 16-08-2021 09:31:34
Tanggal Kedaluwarsa : 23-08-2021 09:31:34
Tanggal Bayar : 19-08-2021 11:12:54
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK CIMB NIAGA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Total Disetor : 158.090.000 (IDR)
Terbilang : *Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 031417997047
NTPN : 5007055DEDN45HD0

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 158.090.000 (IDR)
Keterangan : Pembayaran atas sewa Sebagian Bangunan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPADA
BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL**

NOMOR: BAST/ATR/XII/KNKT 2021

Pada hari ini **Jum'at Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2021** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KEPALA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama **KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SEKRETARIS BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** bertindak untuk dan atas nama **BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan serah terima hasil pekerjaan dan ADK Transfer Keluar-Transfer Masuk untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan dan Arsip Data Komputer (ADK) Transfer Keluar-Transfer Masuk SIMAK BMN kepada Pihak Kedua sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan dan ADK Transfer Keluar-Transfer Masuk SIMAK BMN tersebut pada Pasal 1 untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan mencatat dalam daftar inventaris barang miliknya serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara tersebut.

Pasal 3

Terhitung mulai tanggal Serah Terima Hasil Pekerjaan ini, hak dan tanggung jawab atas Hasil Pekerjaan tersebut sebagaimana lampiran berita acara ini adalah sebagai berikut:

- 1) **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan untuk dikelola dalam tugas operasional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap hasil kegiatan yang diserahterima-operasionalkan;

Pasal 4

Lampiran daftar hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA



PANDU YUNANTO
NIP 196506061988031001

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



WIERSON
NIP 196304151984111001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR : BAST/ATR/XII/KNKT 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPADA
BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNTUK DIGUNAKAN DALAM TUGAS TUGAS OPERASIONAL**

| NO | NAMA BARANG/JASA | NO. & TGL SPK/KONTRAK | VOLUME BARANG/JASA | NILAI BARANG/JASA Masing-masing Item sesuai KONTRAK | TOTAL | PERCATATAN DALAM SIMAK | NUP | TGL PEROLEHAN | NILAI BARANG/JASA SESUAI SIMAK |
|----|---|------------------------------------|--------------------|---|---------------|---------------------------|-----|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Revitalisasi peningkatan Tata ruang Kantor KNKT | • 001/SPPBJ/RPTR/PPK/KNKT/VII/2021 | 1 | 2.191.340.250 | 2.389.599.550 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 1 | 17 Desember 2021 | 2.389.599.550 |
| | | • 199/SPK/PL.03/PPK/KNKT/IV/2021 | 1 | 99.165.000 | | | | | |
| | | • 214/SPK/PL.03/PPK/KNKT/VII/2021 | 1 | 99.094.300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | 2.389.599.550 |

**BERITA ACARA TRANSFER BARANG MILIK NEGARA
ASET TETAP RENOVASI
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor :BA.185 Tahun 2021

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jakarta, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan sebagai tindaklanjut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BA.019/KONST/PPSDMPL 2022, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. AMIRUDDIN, M.M : Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. PANDU YUNianto : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan Belanja Modal yang menghasilkan asset tetap renovasi dan transfer keluar Arsip Data Komputer (ADK) dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan daftar terlampir untuk selanjutnya dikapitalisasi ke asset Gedung dan Bangunan Milik Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dari **PIHAK PERTAMA** hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pasal 1 (satu) dan melakukan Transfer Masuk Arsip Data Komputer (ADK) Sistem Informasi

Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk dikapitalisasi ke asset Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 4

Daftar Lampiran Hasil Pekerjaan lengkap yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Yang menyerahkan,

PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM
PERHUBUNGAN LAUT



AMIRUDDIN, M.M

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660820 199603 1 001

Yang menerima,

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN



RANDU YUNIANTO, ATD., M.Eng.SC

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 199803 1 001

Lampiran : Berita Acara Transfer BMN
Nomor : BA.185 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**DAFTAR BARANG/HASIL PEKERJAAN ASET TETAP RENOVASI
KEPADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | LOKASI | URAIAN ASET YANG TEREKAM DI SIMAK | NOMOR & TGL KONTRAK | NOMOR URUT PENDAFTARAN (NUP) DI APLIKASI SIMAK | NAMA BARANG/JASA | VOLUME BARANG | NILAI PEROLEHAN | UNIT KERJA YANG AKAN MENGOPERASIKAN | KET |
|----|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---------------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sekretariat Balitbanghub | Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi | SP.002/KONST/PPSDMPL-2021 Tanggal 7 September 2021 | 1 | Pekerjaan Peningkatan Kualitas Ruang Kantor (<i>Smart Office</i>) | 1 Unit | 1.608.463.000 | Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut | Nilai Perolehan termasuk PPN dan Honor |

Yang Menyerahkan

Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN LAUT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN


AMIRUDDIN, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660820 199603 1 001


PANDU YUNianto, ATD., M.Eng.SC
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 199803 1 001

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
DARI SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN KEPADA
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

Nomor : DA.48 / BPSDMP-2021
Nomor :

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Jakarta Pusat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. M. YUGIHARTIMAN : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 2329 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. PANDU YUNianto : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Barang yang diangkat berdasarkan Nomor : SK. 2330 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara dan ADK (Arsip Data Komputer) Transfer Keluar-Transfer Masuk sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** berupa Aset Tetap dalam Renovasi (Renovasi Gedung Lantai 2 Sekretariat BPSDM Perhubungan) dengan nilai perolehan Rp76.590.635,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA selanjutnya akan menghapus dari Daftar Inventaris Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai transfer keluar dan **PIHAK KEDUA** akan membukukan Barang Milik Negara tersebut sebagai transfer masuk dan melakukan kapitalisasi nilai Gedung dan Bangunan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 3

PIHAK KEDUA selanjutnya berkewajiban untuk mengusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan melakukan pemeliharaan Barang Milik Negara dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN



M. YUGIHARTIMAN

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610808 198703 1 002

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN



BANDU YUNianto

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Milik Negara

Nomor : BA. 48 / BPSDMP - 2021

Tanggal : 28 Juni 2021

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN
DARI SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEPADA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

| No | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Volume | Tanggal Perolehan | Jenis ATR | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan |
|---------------|---------------------------------|----------------|-----|--------|-------------------|--|----------------------|--------------|
| - | Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) | 6.07.03.01.001 | 5 | 1 Unit | 12 Desember 2020 | Renovasi Gedung Lantai 2 Sekretariat BPSDM Perhubungan | 76.590.635 | Kondisi Baik |
| JUMLAH | | | | | | | 76.590.635 | |

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN

M. YUGHARTIMAN

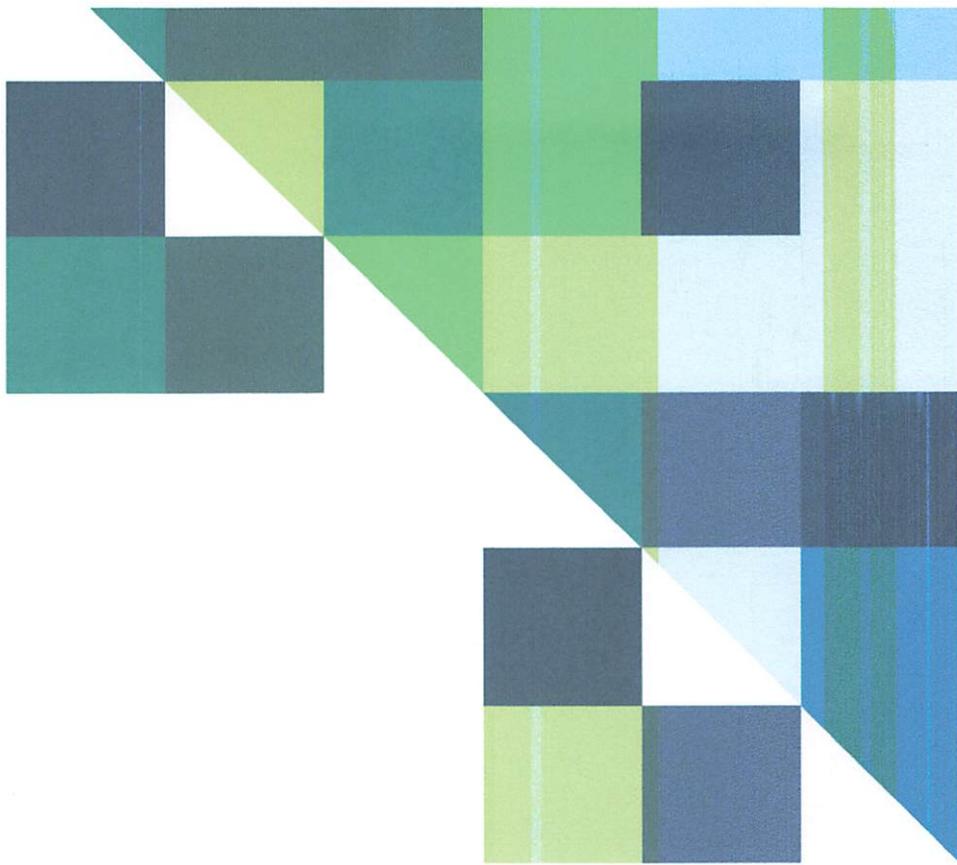
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610808 198703 1 002

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

PANDU YUNianto

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur no. 5
Jakarta Pusat, 10110

Telp/Fax : 021 34833061, 34833065

Website : balitbanghub.dephub.go.id

Email : balitbanghub@dephub.go.id

f t i : balitbanghub151